



BADAN POM



Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 Balai Besar POM di Jakarta



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan I Tahun 2022. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2022 (periode renstra 2020-2024), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM

di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 April 2022

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2021. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal;

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan;
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2022 diukur terhadap 29 indikator kinerja utama yang akan dicapai. Pada triwulan I tahun 2022, dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan, dengan 29 indikator. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 10 (sepuluh) indikator mencapai target dengan kategori “baik” ($90\% \leq x < 110\%$); 2 (dua) indikator mencapai kategori “cukup” ($70\% \leq x < 90\%$); 4 (empat) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, 2 (dua) indikator mencapai target dengan kategori “sangat baik” ($110\% \leq x < 120\%$) dan 2 (dua) indikator mempunyai capaian dengan kategori “kurang” ($50\% < x < 70\%$). Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 45.606.169.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada tahun Triwulan I tahun 2022 sebesar Rp 5.811.992.442 (lima milyar

delapan ratus sebelas juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 12,74%.

Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar aman dari bahan berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Jakarta.

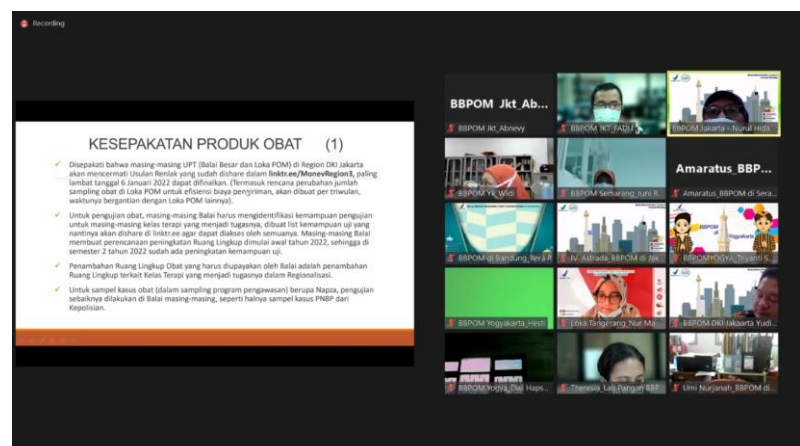
HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan **terobosan** di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembahasan Regionalisasi Laboratorium Pengujian: Bersinergi Dalam Efektivitas dan Efisiensi

Dalam rangka meningkatkan pengawasan *post-market* dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium, Badan POM mengembangkan konsep perwilayahan atau regionalisasi laboratorium. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian dalam rangka mewujudkan pengujian yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan. Rapat membahas tentang alokasi sampel, distribusi, lingkup parameter pengujian khusus regionalisasi, seperti pengujian spesifik residu obat hewan, kontaminan hasil proses, mikotoksin, residu pestisida, air, produk rendah DNA porcine, BTP Khusus dan Bahan Berbahaya, cemaran logam dan kemasan; untuk obat tradisional, misalnya klaim stamina pria, klaim pelangsing, klaim batuk/sesak. *Sampling* obat dan

makanan mengacu pada ketentuan mengenai Pedoman Sampling dan Pengujian. Untuk pengujian obat, masing-masing unit pelaksana harus dapat



mengidentifikasi kemampuan pengujian untuk masing-masing kelas terapi. Penambahan ruang lingkup obat yang harus diupayakan oleh unit pelaksana adalah penambahan ruang lingkup terkait kelas terapi yang menjadi tugasnya dalam regionalisasi.

Balai koordinator bersama balai dan loka anggota menyusun dan menyepakati rencana aksi di awal waktu *sampling* agar sampel dengan jenis/kategori/tipe produk sejenis dilakukan dalam periode waktu yang sama. Balai koordinator mengoordinasikan jenis sampel dan waktu pelaksanaan *sampling* seluruh balai maupun loka anggota secara rutin setiap bulan. Agar pelaksanaan *sampling* dapat dilakukan secara simultan untuk berbagai komoditas, maka balai koordinator bertugas melaksanakan dan memantau balai dan loka anggota dan jika perlu melaporkan ke Direktorat Pengawasan terkait. Apabila terdapat perubahan target proporsi jumlah sampel, maka Unit Pelaksana Teknis dapat melaporkan kepada Kedeputian terkait sesuai dengan ketentuan Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat dan Makanan. Balai dan loka melakukan *sampling* dan input data serta *tracking* sampel ke dalam aplikasi SIPT. Selain itu, pengiriman sampel juga perlu dipikirkan agar berlangsung lebih efektif dan efisien. Pelatihan antar balai juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi personil pengujian. Dengan adanya regionalisasi ini, diharapkan dengan adanya sinergitas antara unit pusat dengan unit pelaksana, kegiatan pengujian di laboratorium dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Pelayanan Prima Ijin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Memulai tahun 2022 Balai Besar POM di Jakarta pada 10 Januari 2022, menyelenggarakan kegiatan perdana pelayanan publik desk e-sertifikasi Cara produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), hal ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang telah memasukkan permohonan melalui sistem e-sertifikasi untuk dapat segera

mendapatkan *feedback* hasil evaluasi dari evaluator Balai Besar POM di Jakarta.

Sesuai dengan **Per BPOM 22 tahun 2021** tentang **Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik**, terjadi perubahan sistem dalam memperoleh rekomendasi Pemeriksaan sarana oleh Balai (PSB). Perubahan sistem ini berdampak pada tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha dengan skala UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dengan resiko produk yang di produksi adalah resiko rendah dan menengah, di mana tahapan PSB harus ada sebelum rekomendasi terbit, menjadi tanpa adanya PSB diganti dengan pemenuhan komitmen dan pemenuhan standar pelaksanaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam jangka waktu 6-12 bulan setelah diterbitkannya izin penerapan CPPOB oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta.



3. BBPOM di Jakarta Bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Bersinergi Untuk Melaksanakan Program Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2022

Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Yudi Noviandi, M.Sc. Tech, Apt. menyampaikan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi Program Desa Pangan Aman, Pasar

Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) serta program Fasilitasi UMKM Pangan. Sebagai lokus intervensi terdapat 7 kelurahan, 1 pasar tradisional, dan 62



sekolah (20 sekolah akan mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dan 42 sekolah akan mengikuti sosialisasi keamanan pangan dan mendapatkan paket edukasi) yang terdapat di kota Administrasi Jakarta Selatan. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Drs. H. Isnawa Adji, M.AP, menyambut baik program tersebut dan memberikan arahan kepada OPD terkait untuk saling bersinergi dan berkoordinasi dengan baik dalam penentuan lokus intervensi dan dalam pelaksanaan program keamanan pangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan *tagline* “*Jakarta Kolaborasi*”, diharapkan dapat terbentuk sinergisme dan komitmen bersama BBPOM di Jakarta beserta pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan terpadu tahun 2022.

4.Recover Together, Recover Stronger: Partisipasi Badan POM dan Balai Besar POM di Jakarta Dalam Rangka Tugas Food Security di Acara Pertemuan Delegasi G20

Kelompok Duapuluh atau G20 merupakan suatu aliansi yang beranggotakan negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa (*European Union*), termasuk



Indonesia yang tergabung di dalamnya dan menjadi tuan rumah dalam acara G20 yang diselenggarakan tahun ini. G20 secara resmi dibentuk pada

tahun 1999 sebagai forum diskusi antar pemerintah yang membahas tentang isu-isu penting perekonomian di dunia, termasuk isu penting yang dibahas pada pertemuan G20 tahun ini adalah arsitektur kesehatan global (*global health architecture*), transformasi digital (*digital transformation*) serta transisi energi berkelanjutan (*sustainable energy transition*). Lebih lanjut, isu mengenai keamanan pangan global juga turut menjadi topik yang dibahas dalam G20 kali ini, terutama di masa pandemi COVID-19. Dengan slogan "**Recover Together, Recover Stronger**", perekonomian dunia diharapkan dapat kembali pulih dan bangkit akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Sebagai instansi pemerintah yang turut berkontribusi dalam perkembangan sektor perekonomian di Indonesia, khususnya pengawasan obat dan makanan yang beredar, Badan POM bersama dengan unit pelaksana teknis Balai Besar POM di Jakarta turut mengambil langkah partisipatif dengan melakukan kegiatan *food-security* (keamanan pangan), yaitu inspeksi sarana dan fasilitas dapur produksi serta pengujian sampel makanan yang akan dihidangkan untuk para delegasi G20. Inspeksi dan pengujian sampel makanan berlangsung di tiga lokasi utama, yaitu Jakarta Convention Center, Hutan Kota Plataran dan Hotel

Fairmont. Kegiatan food-security ini berlangsung selama dua hari, yaitu pada tanggal 17-18 Februari 2022.

5. Balai Besar POM di Jakarta Sita Ratusan Kilogram Mie Kuning Mengandung Formalin dan Boraks

Dalam rangka Operasi OPSON XI Tahun 2022, Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta bersama Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Timur serta berkolaborasi dengan Direktorat Penyidikan, Direktorat Intelijen dan Direktorat Siber Obat dan Makanan, melakukan penindakan terhadap sebuah bangunan 5 lantai yang memproduksi mie kuning mengandung formalin dan boraks di wilayah Jatinegara Jakarta Timur, Selasa, 22 Maret 2022.

Dari hasil penindakan tersebut, berhasil disita barang bukti berupa ratusan kilogram mie kuning mengandung formalin dan boraks, serbuk boraks dan formalin serta peralatan terkait yang digunakan dalam produksi mie tersebut. Selain, itu penyidik juga menyita sisa cairan yang mengandung formalin. Mie mengandung formalin dan boraks tersebut dijual ke berbagai pasar tradisional di sekitar Jakarta Timur.

6. Menjadi Perwakilan DKI Jakarta, Pasar Mayestik Berhasil Mencapai Nominasi 6 Besar Dalam Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tingkat Nasional

Pada Kamis (17/03/2022), dilaksanakan verifikasi lapangan oleh tim verifikator yang terdiri dari perwakilan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perdagangan juga dihadiri oleh Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya serta Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM di Jakarta beserta tim selaku unit pembina.

Pencapaian ini diharapkan dapat mendorong semangat, kreativitas dan partisipasi Pemerintah Daerah dan Perumda Pasar Jaya beserta komunitas



pasar untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan membuat replika pasar aman untuk pasar lainnya yang ada di daerah DKI Jakarta

7. Balai Besar POM di Jakarta Wilayah Bebas Dari Penyalahgunaan Narkoba

Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan kegiatan pemeriksaan penggunaan narkoba melalui tes urine dan sosialisasi penyalahgunaan narkoba oleh tenaga penyuluh Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat,



25 Maret 2022 yang diikuti oleh pegawai BBPOM di Jakarta sejumlah 148 (seratus empat puluh delapan) orang. Mengingat pentingnya kerahasiaan pemeriksaan untuk mendapat hasil yang valid dan akurat, kegiatan ini dilaksanakan secara serta merta tanpa diketahui sebelumnya oleh pegawai.

Kegiatan diawali dengan Sosialisasi kepada seluruh pegawai yang disampaikan oleh Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP DKI Jakarta, Bapak Sunaryo dengan materi data penyalahgunaan narkoba di provinsi DKI

Jakarta, jenis penyalahgunaan dan aturan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh PNS. Selanjutnya dilaksanakan tes urine kepada seluruh pegawai oleh tim BNNP DKI Jakarta dengan pemeriksaan terhadap 7 parameter narkoba. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh pegawai BBPOM di Jakarta negatif penyalahgunaan narkoba.

8. BBPOM di Jakarta Melaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan Bersama Komisi IX DPR RI

Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama Komisi IX DPR RI, Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. yang bertempat di



Jakarta Pusat. Kegiatan KIE tersebut dihadiri oleh masyarakat dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si menyampaikan pentingnya memilih pangan yang *halalan toyyiban* (halal dan baik). Cara mengetahui pangan tersebut baik atau tidak dengan cara CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluarsa). Selain itu, pada kegiatan KIE tersebut Kepala BBPOM di Jakarta, Ibu Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si. menyampaikan materi terkait Keamanan Obat dan Makanan serta menekankan bagaimana peran serta masyarakat dalam keikutsertaannya melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Masyarakat juga turut berpartisipasi secara langsung untuk mempraktikkan pengecekan Nomor Izin Edar BPOM pada produk obat dan makanan melalui aplikasi BPOM Mobil

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
<i>Highlight</i> Kinerja Balai Besar POM di Jakarta	vi
Daftar Isi	xxvii
Daftar Tabel	xxvi
Daftar Gambar	xxxii
Daftar Lampiran.....	xxxv
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.3. Struktur Organisasi.....	6
1.4. Isu Strategis	6
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	25
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	46
2.3. Perjanjian Kinerja.....	49
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	53
2.5. Metode Pengukuran.....	58
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	60
3.2. Realisasi Anggaran	220
3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan	223

Bab IV Penutup

4.1. Kesimpulan	231
4.2. Saran	231

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Beban Kerja Balai Besar POM di Jakarta	11
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	29
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta TA 2022 .	47
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022	50
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022	53
Tabel 6. Kriteria pencapaian kinerja.....	58
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis triwulan I Tahun 2022 ..	60
Tabel 8. Hasil Pencapaian indikator kinerja	62
Tabel 9. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	68
Tabel 10. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	72
Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	84
Tabel 13. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	89
Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	97
Tabel 15. Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	101
Tabel 16. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.....	104
Tabel 17. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	108

Tabel 18. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	111
Tabel 19. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.....	116
Tabel 20. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022	120
Tabel 21. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	126
Tabel 22. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan TW 1 tahun 2022 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta	130
Tabel 23. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	134
Tabel 24. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2022 Triwulan 1 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta	137
Tabel 25. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2022	140
Tabel 26. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022	148
Tabel 27. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	154
Tabel 28. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2022 ...	159
Tabel 29. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022.....	164
Tabel 30. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	170
Tabel 31. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022	174
Tabel 32. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2022	187

Tabel 33. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	190
Tabel 34. Kategori Penilaian SAKIP	192
Tabel 35. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	194
Tabel 36. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022	196
Tabel 37. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2022	198
Tabel 38. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	205
Tabel 39. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022	217
Tabel 40. Efisiensi kegiatan per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022	228

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta (semula) mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta (menjadi) mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta	6
Gambar 4. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan TW I 2022	12
Gambar 5. Profil Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022	13
Gambar 6. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta	15
Gambar 7. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022.....	16
Gambar 8. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta	28
Gambar 9. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta	32
Gambar 10. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 ...	70
Gambar 11. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 ...	81

Gambar 12. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87
Gambar 13. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 Capaian dan realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Triwulan I tahun 2022 sebesar 106.28% dan 94.59%. Capaian dan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat melebihi target Tahun 2022.	93
Gambar 14. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	114
Gambar 15. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	118
Gambar 16. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta	121
Gambar 17. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	129
Gambar 18. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	136
Gambar 19. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat	152
Gambar 20. Kegiatan advokasi terpadu keamanan pangan	153
Gambar 21. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	172

Gambar 22. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	177
Gambar 23. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2021 dan 2022.	183
Gambar 24. Nilai EKA BBPOM Jakarta Tahun 2021 pada aplikasi SMART	208
Gambar 25. Nilai IKPA BBPOM Jakarta Tahun 2021 pada aplikasi OMSPAN	208
Gambar 26. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan Balai lain209
Gambar 27. Perbandingan pagu, realisasi anggaran, dan capaian realisasi anggaran BBPOM di Jakarta Triwulan I Tahun 2022	216

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	233
Lampiran 2	234
Lampiran 3	237
Lampiran 4.	243

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

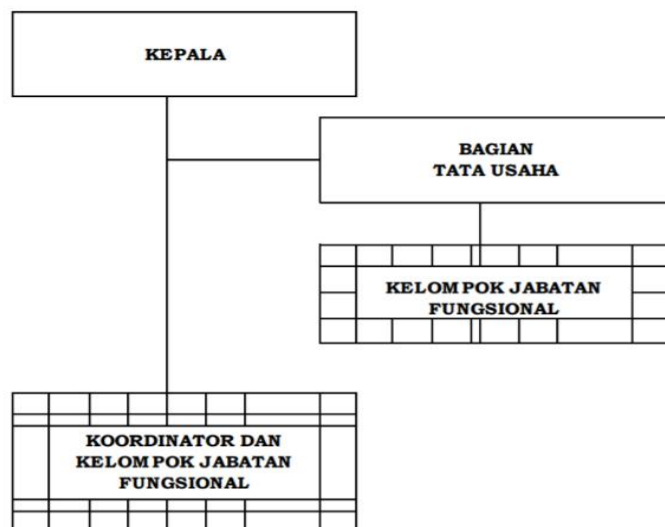
Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan

kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

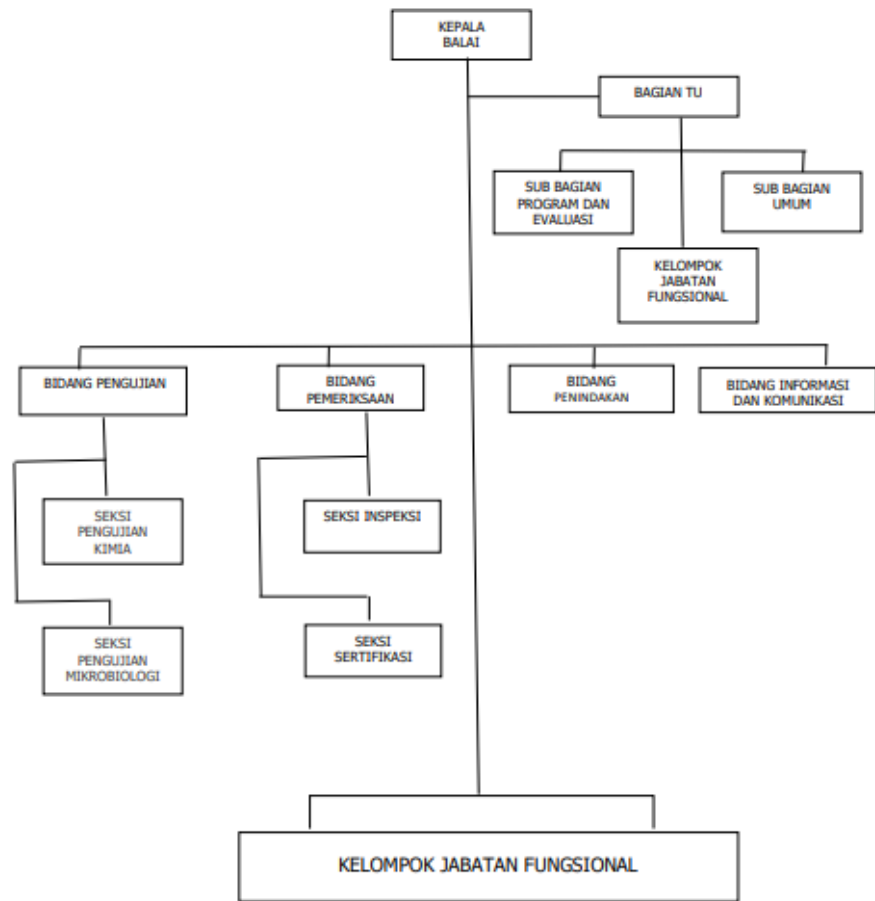
1.2. Gambaran Umum Organisasi

Perubahan organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka reformasi birokrasi dengan

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



mengalihkan jabatan administratif menjadi jabatan fungsional sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta (semula) mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta (menjadi) mengacu kepada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berdasarkan gambar, nampak bahwa perubahan yang signifikan adalah penghapusan jabatan struktural Eselon 3 (Kepala Bidang) dan Eselon 4 (Kepala Seksi) dalam rangka memangkas birokrasi sehingga diharapkan kinerja SDM akan lebih efisien dan efektif.

Tugas

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;

- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

1.3. Isu Strategis

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Kelompok Substansi Pengujian** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di kelompok substansi pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pengujian menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Penyusunan rencana dan program di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - 2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
 - 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Pengujian terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

b. **Kelompok Substansi Pemeriksaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di subkelompok substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di Substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Substansi Pemeriksaan terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Inspeksi;
2. Subkelompok Substansi Sertifikasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

- c. **Substansi Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. **Substansi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
5. Pelaksanan urusan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi;
2. Subkelompok Substansi Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. *Subkelompok Substansi Umum* mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

a. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

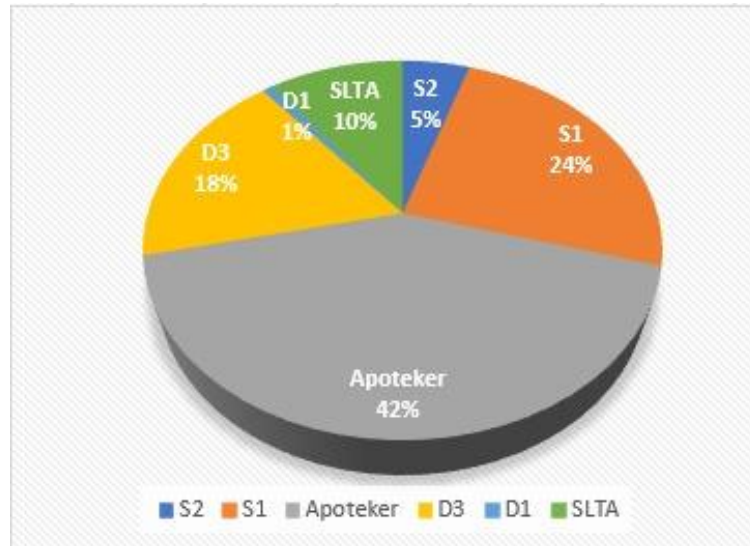
Pada Renstra BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024, berdasarkan analisis beban kerja per Desember 2019, Balai Besar POM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 151 orang. Namun seiring dengan perkembangan lingkungan strategis didapatkan hasil *review* Analisis Beban Kerja sebagai berikut:

	Pemeriksaan	Penindakan	Informasi dan Komunikasi	Pengujian	Tata Usaha	Jumlah
Standar Kebutuhan SDM (berdasarkan ABK 2022)	37	23	9	68	41	178
Jumlah pegawai saat ini	25	14	11	46	23	119
Kekurangan SDM	12	9	(-2)	22	18	59

Tabel 1. Analisis Beban Kerja Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan table di atas, disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta membutuhkan pegawai sebanyak 178 orang sedangkan pegawai yang ada saat ini adalah 119 orang, sehingga masih dibutuhkan pegawai sejumlah 59 orang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang optimal di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Profil pegawai Balai

Besar POM di Jakarta berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 100 orang perempuan (84,03%) dan 19 orang laki-laki (15,97%). Profil pegawai Balai Besar POM di Jakarta berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada Gambar 2 sebagai berikut:

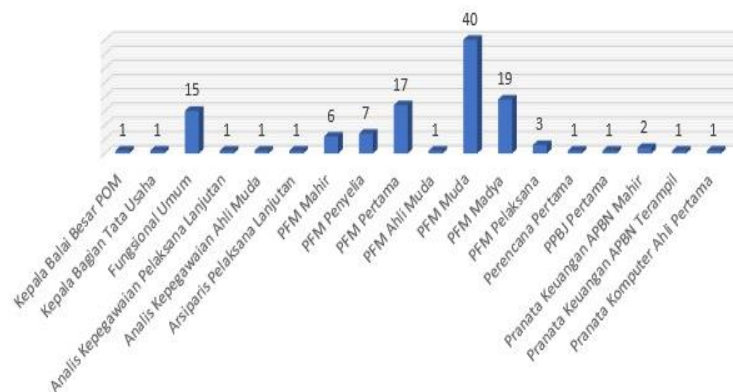


Gambar 1. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan TW I 2022

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Jakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 31 Oktober 2021 adalah 119 orang yang terdiri dari 100 orang perempuan dan 19 orang laki-laki (dengan proporsi 84,03% perempuan dan 15,97% laki-laki). Jumlah SDM Balai Besar POM di Jakarta tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta secara optimal. Dari gambar

3 dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BBPOM di Jakarta berpendidikan profesi apoteker dan S1. Namun masih terdapat pegawai dengan Pendidikan non sarjana sebanyak 29%. Balai Besar POM di Jakarta yang merupakan organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S1 dan S2 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Berdasarkan jabatannya, pegawai BBPOM di Jakarta terbagi menjadi beberapa jabatan fungsional seperti tercantum dalam Gambar 4. Masih terdapat 15 pegawai dengan jabatan Fungsional Umum yang perlu ditingkatkan kompetensinya.



Gambar 4 Profil Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di No. hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m²

dan luas bangunan 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di No. memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

Laboratorium Keliling telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017.

4. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Jakarta bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.432747/ sebesar Rp 45.606.169.000,-.

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

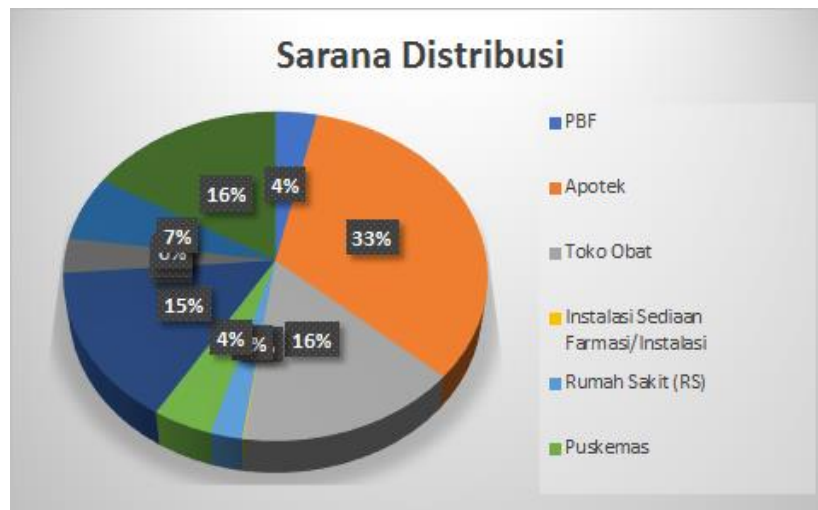
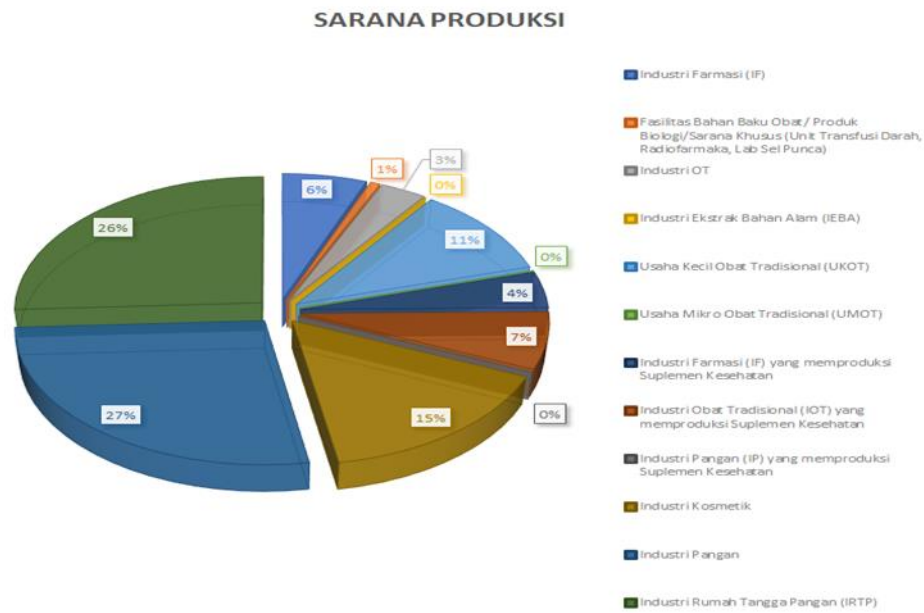
Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana pada



Gambar 3. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut :

KEKUATAN	KELEMAHAN
- Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan	- Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Jakarta menerapkan RB - Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> - Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas - Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan - <i>Mobile lab</i> dan mini laboratorium - Integritas pelayanan publik - Fasilitas laboratorium yang memadai - Penyebaran informasi melalui saluran komunikasi di media <i>online</i>, cetak dan media sosial - Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha - Kerjasama dengan aparat 	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi beberapa sistem mutu belum efisien - Masih memerlukan waktu yang lama dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian - ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu - Sarana prasarana belum optimal - Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi - Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum - Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai - <i>Networking</i> yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah - Laboratorium telah terakreditasi ISO 17025 : 2017 - Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015 	
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> - Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat - Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat - Perkembangan <i>e-commerce</i> ke depan cukup besar - Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin maraknya penjualan obat dan makanan <i>online</i> - Besarnya pangsa pasar obat tradisional - Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan - Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera - Kurangnya dukungan

KEKUATAN	KELEMAHAN
<p>informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi - Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan - Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia - Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan secara <i>online</i> - Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan - Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi - Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik - Perkembangan iklan yang begitu ceoat dan kompetitif termasuk iklan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan 	<p>dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i> - Adanya bonus demografi pada periode 2020-2024 - Peningkatan daya saing pelaku usaha - Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan - Modus pelanggaran semakin kompleks - Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan - Adanya program Nasional (JKN dan SKN) - Implementasi program fortifikasi pangan

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

1. Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah / PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka

pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta melakukan *sampling* produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online* berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Jakarta meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan

cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui HaloBPOM, media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, *Car Free Day*, *talkshow*, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM *Mobile*, dan penyebaran informasi melalui *website* BPOM.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

7. Pandemi COVID-19

COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020. Kasus pasien COVID-19 di Indonesia meningkat signifikan sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 telah dikeluarkan strategi dan kebijakan oleh pemerintah antara lain pembatasan interaksi dan mewajibkan untuk bekerja dari rumah (*work from home/WFH*). Kondisi ini mempengaruhi semua kegiatan yang merupakan tugas pokok Balai Besar POM di Jakarta. Dari semula semua kegiatan berbasis interaksi langsung menjadi interaksi jarak jauh. Penyelenggaraan layanan dilakukan untuk menjamin keamanan dalam kondisi darurat dalam rangka tetap melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

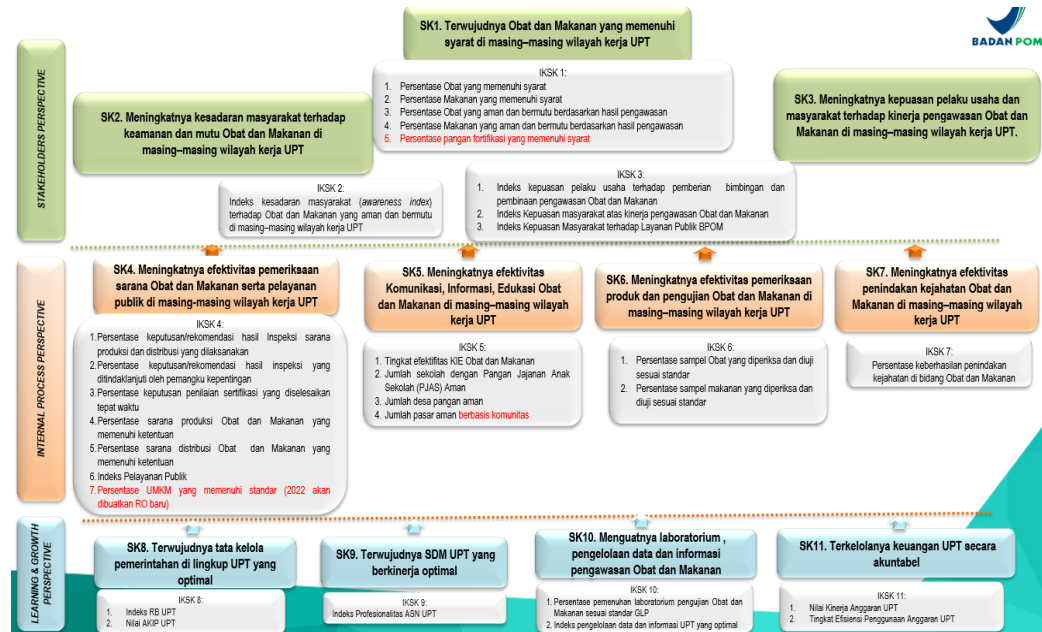
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan

serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta kerja strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

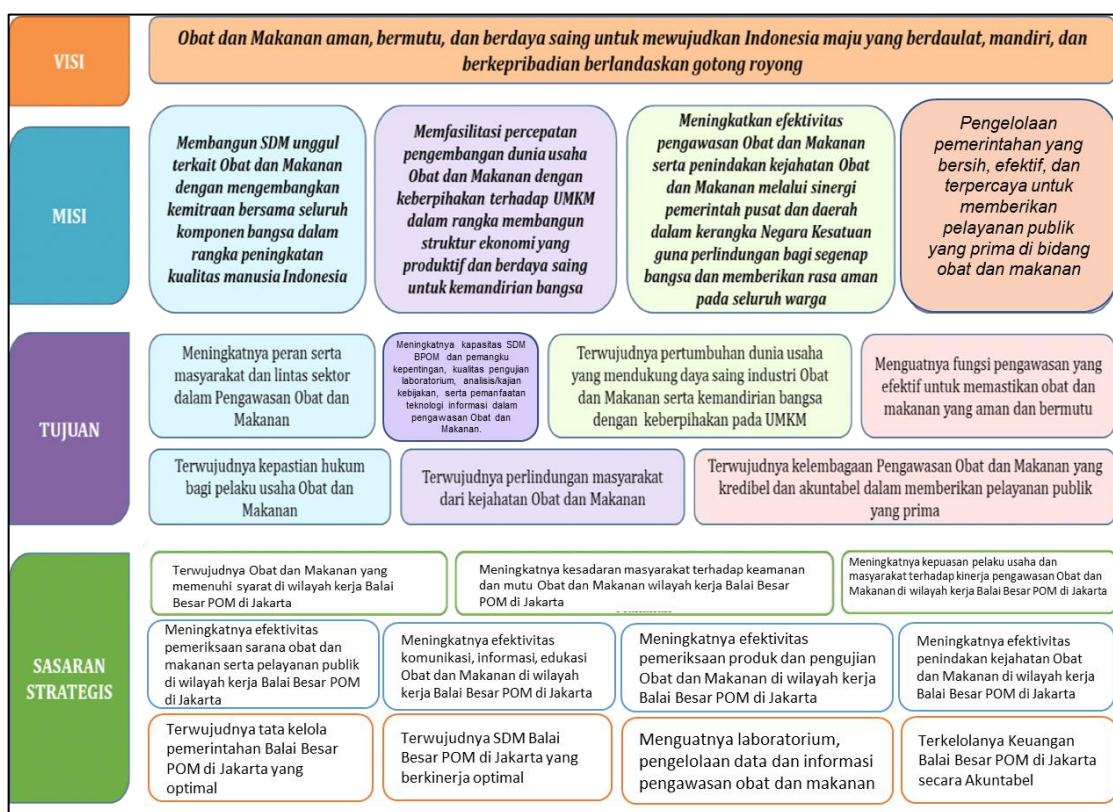
Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
	Stakeholder						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5	
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83	
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86	
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.01	

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Balai Besar POM di Jakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,30	4,40	4,51
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79
	Internal Process						
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	92
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar	1,51	2	2,25	2,5	3

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		POM di Jakarta yang optimal					
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	-	-	-

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective):

a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Balai Besar POM di Jakarta.

Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang di *sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang

digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2022 ditargetkan sebesar 81%**
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2022 ditargetkan sebesar 95,5%**
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2022 ditargetkan sebesar 81%**

(4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2022 ditargetkan sebesar 83%

(5) Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat ditargetkan sebesar 89%

b. Sasaran Strategis 2: *Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh

industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 87 pada akhir tahun 2022.**

c. Sasaran Strategis Ke-3: *Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi

lain layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 87,7 di tahun 2022;**
- (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 76,65 di tahun 2022; dan**
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 91 di tahun 2022.**

Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective):

a. Sasaran Strategis 4: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun

suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 90% pada akhir tahun 2022;**
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 79% pada akhir tahun 2022;**
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 87% pada akhir tahun 2022;**
- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 63% pada akhir tahun 2022;**
- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 75% pada akhir tahun 2022; dan**
- (6) Indeks pelayanan publik, dengan target 4,3 pada akhir tahun 2022.**
- (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target 77% pada akhir tahun 2022**

b. Sasaran Strategis 5: *Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama

kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 94,4 pada akhir tahun 2022;**
- (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 65 pada akhir tahun 2022;**
- (3) Jumlah desa pangan aman dengan target 21 pada akhir tahun 2022; dan**
- (4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 3 pada akhir tahun 2022**

c. Sasaran Strategis 6: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2022; dan**
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2022.**

d. Sasaran Strategis 7: *Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak

pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 58% pada akhir 2022.

Perspektif Pembelajaran (Learning and Growth Perspective):

a. Sasaran Strategis Ke-8: *Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal*

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi

publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM.

Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

(1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 83.4 pada akhir tahun 2022; dan

(2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 80 pada akhir tahun 2022.

b. Sasaran Strategis 9: *Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal*

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dengan target sebesar 84.5 di tahun 2022.

c. Sasaran Strategis Ke-10: *Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan*

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*.

Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai.

Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari

sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 82% pada 2022 dan**
- (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal dengan target 2,25 pada tahun 2022.**

d. Sasaran Strategis 11: *Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel*

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target 92,5 sebesar pada tahun 2022; dan

2.2. Rencana Kerja Tahunan 2022

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020.

Tabel 2 Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta TA 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
		05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87
3.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7
		08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65
		09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,30
		16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
		18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65
		19-Jumlah desa pangan aman	21
		20-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3
6.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
8.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4
		25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5
10.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25
11.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 41.686.698.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
	02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5
	03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
	04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
	05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87
03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7
	08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65
	09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
	11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
	12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
	13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
	14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
	15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,30
	16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
	18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65
	19-Jumlah desa pangan aman	21
	20-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3
06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4
	25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80
09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
	28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25
11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81%	81%	81%	81%	465.152.450
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	298.193.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	81%	81%	81%	465.152.450
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83%	83%	83%	83%	298.193.000
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89%	89%	89%	89%	50.898.400
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				87	318.225.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta						
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				87,7	46.325.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				76,65	371.262.500
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				91	82.596.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90%	90%	90%	90%	396.496.750
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	79%	79%	79%	79%	396.496.750

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87%	87%	87%	87%	295.830.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	63%	63%	63%	160.788.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75%	75%	75%	75%	632.205.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				4,30	371.262.500
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				77	85.159.900
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,4	94,4	2.603.617.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
.	edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30% (progress)	70% (progress)	90% (progress)	65	767.240.000
		Jumlah desa pangan aman	25% (progress)	40% (progress)	65% (progress)	21	1.097.149.000
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	25% (progress)	70% (progress)	70% (progress)	3	110.081.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				100%	398.702.100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	100%	277.407.600
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	30%	45%	58%	1.444.888.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta				83.4	91.936.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta				80	54.154.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta				84.5	27.090.178.000
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>				82	6.770.065.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	137.915.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	77	80	86	92,5	28.600.000

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	

Kriteria	Capaian	Keterangan
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perhitungan/ pengukuran kinerja perlu dilakukan

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis triwulan I Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	96,36	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87,67	Cukup
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	91,7	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	190,7	Tidak dapat disimpulkan
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	183,8	Tidak dapat disimpulkan
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	97,78	Baik
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	80,65	Cukup

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pencapaian indikator kinerja

Nama Indikator	Volume				Kriteria	Anggaran per Sasaran Strategis		
	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	a	b	c	$d=(c/b*100)$	e	f	g	$h=(g/f*100)$
01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	76,43	94,36	BAIK	465.152.450	46.016.473	9,89
02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5	95,5	96,06	100,59	BAIK	298.193.000	11.757.085	3,94
03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	56,16	69,33	KURANG	465.152.450	46.016.473	9,89
04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	92,31	111,22	SANGAT BAIK	298.193.000	11.757.085	3,94
05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	94,59	106,28	BAIK	18.662.000	3.666.950	19,65
06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87	-	-	-	-	195.651.000	21.696.978	11,09

Nama Indikator	Volume				Kriteria	Anggaran per Sasaran Strategis		
	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	a	b	c	$d=(c/b*100)$	e	f	g	$h=(g/f*100)$
07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7	-	-	-	-	46.325.000	0,00	0,00
08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65	-	-	-	-	228.259.500	25.313.141	11,09
09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	-	-	-	-	82.596.000	0,00	0,00
10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90,28	100,31	BAIK	356.369.750	19.512.503	5,48
11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	78,13	98,90	BAIK	356.369.750	19.512.503	5,48
12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87	88,78	102,05	BAIK	295.830.000	5.540.000	1,87
13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	77,46	122,95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	137.852.000	12.639.130	9,17

Nama Indikator	Volume				Kriteria	Anggaran per Sasaran Strategis		
	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	a	b	c	d=(c/b*100)	e	f	g	h=(g/f*100)
14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	88,52	118,03	SANGAT BAIK	574.887.500	26.385.876	4,59
15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,3	-	-	-	-	228.259.500	25.313.141	11,09
16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	23,33	16,67	71,45	CUKUP	85.159.000	0,00	0,00
17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,54	100,15	BAIK	2.603.617.000	249.427.541	9,58
18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65	30 (progress)	20 (progress)	66,67	KURANG	720.402.000	19.140.000	2,66
19-Jumlah desa pangan aman	21	25 (progress)	25 (progress)	100	BAIK	1.046.723.000	63.735.000	6,089
20-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	25 (progress)	25 (progress)	100	BAIK	110.081.000	15.950.000	14,49
21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	10	20,4	204	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	398.702.100	39.442.691	9,89

Nama Indikator	Volume				Kriteria	Anggaran per Sasaran Strategis		
	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	a	b	c	$d=(c/b*100)$	e	f	g	$h=(g/f*100)$
22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	10	17,74	177,4	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	263.592.000	11.649.051	4,42
23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58	10	18,38	183,8	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	1.416.068.000	58.076.388	4,10
24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4	-	-	-	-	119.866.000	15.210.500	12,69
25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80	-	-	-	-	30.724.000	5.838.000	19
26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5	-	-	-	-	258.557.240.000	7.855.394.477	3,04
27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-	-	-	-	5.825.243.000	1.550.324.565	26,61
28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,25	2,2	97,78	BAIK	137.915.000	131.146.000	95,09

Nama Indikator	Volume				Kriteria	Anggaran per Sasaran Strategis		
	Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	a	b	c	$d=(c/b*100)$	e	f	g	$h=(g/f*100)$
29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5	77	62,1	80,65	CUKUP	24.100.000	1.833.000	7,61

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 10 (sepuluh indikator mencapai target dengan kriteria “**BAIK**”, 2 (dua) indikator mencapai target dengan kategori “**CUKUP**”, 4 (empat) indikator mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kategori “**TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**” target dengan 2 (dua) indikator mencapai kategori “**SANGAT BAIK**” dan 2 (dua) orang indicator mencapai kategori “**KURANG**”.

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk

beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, *banner* dan poster di tempat-tempat strategis dan informasi di media sosial serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	81	81	76,42	94,35	BAIK

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

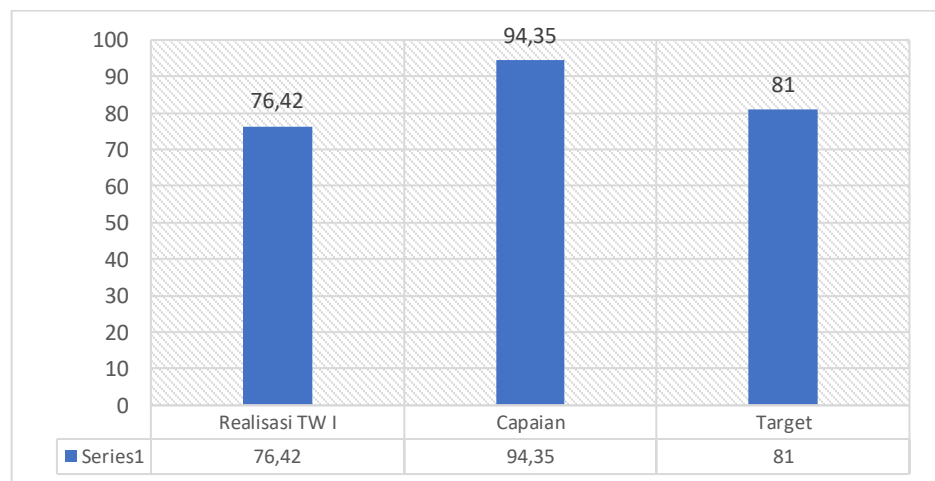
$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil uji dari Balai Penguji untuk poin 5.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan triwulan I tahun 2022 yaitu **94.35%** dengan kriteria “**Baik**”.



Gambar 6. Perbandingan realisasi dan capaian tahun
2022

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum tercapainya target indikator kinerja TW 1 tahun 2022 dipengaruhi oleh banyaknya sampel kosmetik hasil sampling acak yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga menyebabkan persentase obat yang memenuhi syarat sangat rendah.

Dari 403 sampel acak yang masuk laboratorium, 263 sampel sudah selesai diuji (65.26%), namun yang memenuhi syarat hanya sebesar 49.87%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta .Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan

yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Hal ini akan menimbulkan efek jera pada pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi temuan pelanggaran

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi*

Tindak lanjut dari rekomendasi periode sebelumnya yaitu pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang Obat Tradisional dan Kosmetik. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin mengadakan Bimbingan Teknis untuk para pelaku usaha. Namun dengan adanya relaksasi dalam evaluasi pre market, khususnya untuk kosmetik yang pendaftarannya hanya melalui notifikasi, hal ini menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya mengurangi jumlah produk yang tidak memenuhi ketentuan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022*

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	95,5	95,5	96,06	100,59	BAIK

Yang dimaksud dengan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai

memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

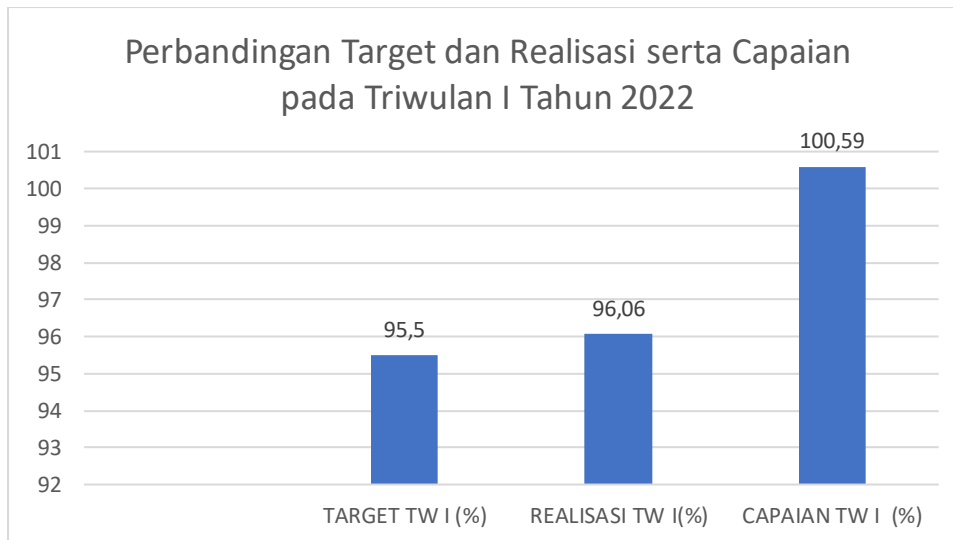
$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil uji dari Balai Penguji untuk memperoleh poin d.5.
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun 2022*

Persentase Capaian dan Realisasi Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta di Triwulan I tahun 2022 sebesar 100.59 % dan 96.06% **diatas target** TW I Tahun 2022 yang ditetapkan yaitu 95.5% dengan kriteria **“baik”**.



Gambar 7. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022

Pada TW I Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi pengujian kimia dan mikrobiologi dari 127 sampel pangan yang diuji terdapat 2 sampel yang tidak memenuhi syarat uji kimia dan 3 sampel pangan yang diperiksa dan kriteria tidak memenuhi syarat (TMK label penandaan dimana ketiga sampel adalah TMK Major). Sampel tersebut adalah sampel pangan dengan kategori es selain es krim dan es susu, permen karet, sirup dan manisan buah kering.

Banyaknya produk manisan buah kering yang tidak memenuhi syarat di peredaran, memerlukan pengawasan khusus agar tidak ada lagi produk yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat karena di tahun 2021 produk manisan buah kering tidak memenuhi syarat juga beredar.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Persentase Capaian dan realisasi makanan yang memenuhi syarat di tahun 2022 diatas target Tahun 2022 yang ditetapkan yaitu 100.59% dengan kriteria “Baik”
Persentase Realisasi makanan yang memenuhi syarat di TW I tahun 2022 juga meningkat dikarenakan jumlah makanan yang memenuhi syarat lebih banyak dibandingkan dengan TW I tahun 2021.
- Pada TW I Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi pengujian kimia dan mikrobiologi dari 127 sampel pangan yang diuji terdapat 2 sampel yang tidak memenuhi syarat uji kimia dan 3 sampel pangan yang diperiksa dan kriteria tidak memenuhi syarat (TMK label penandaan dimana ketiga sampel adalah TMK Major). Sampel tersebut adalah sampel pangan dengan kategori es selain es krim dan es susu, permen karet, sirup dan manisan buah kering.
- Beredarnya produk manisan buah kering yang tidak memenuhi syarat di masyarakat pada tahun ini maupun pada tahun 2021 memerlukan pengawasan khusus agar tidak ada lagi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat di masyarakat.
- Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2022 di atas target yang ditetapkan, dengan kriteria baik. Meskipun realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sudah di atas target, namun masih ada produk yang TMK Major yaitu TMS Label/Penandaan.
- Persentase Capaian makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan I Tahun 2022 di atas target TW I dan target tahunan hal ini menunjukkan bahwa produk pangan yang beredar di masyarakat sebagian besar adalah produk yang memenuhi syarat.

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu
- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (*CAPA*) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.

- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta guna memberdayakan masyarakat agar cerdas dalam memilih produk yang berkualitas dan aman bagi kesehatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan penyidikan, KIE serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada butir b di atas, jika dilaksanakan secara maksimal dan terus menerus akan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Namun jika pelaksanaannya kurang intensif, dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan dan Infokom terkait dengan temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta agar dapat dilakukan pembimbingan dan diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Melakukan evaluasi pengawasan dan pengujian secara berkala untuk produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK yang telah dibimbing.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	56,16	69,34	KURANG

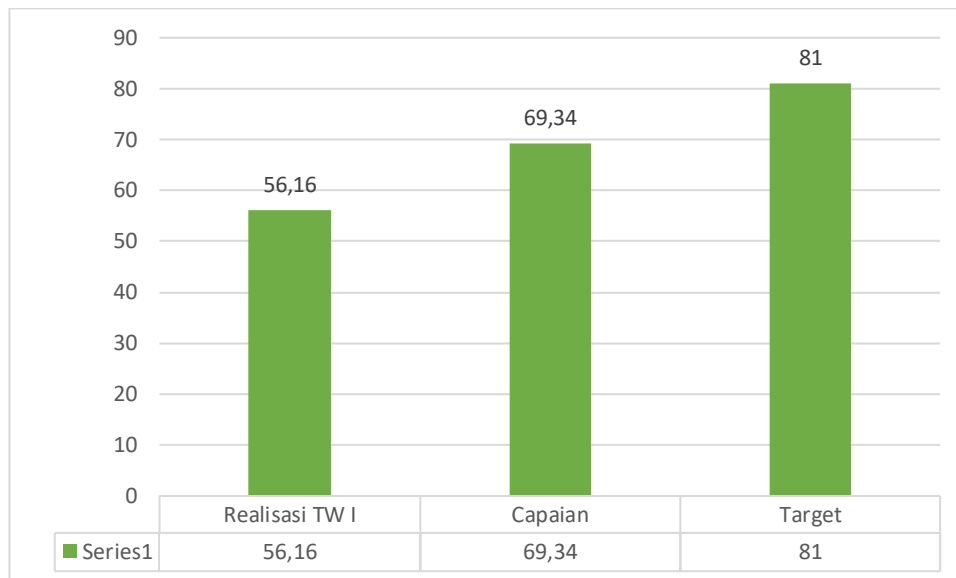
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian di laboratorium
- Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian dengan Tahun 2022



Gambar 8. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022

Persentase capaian Triwulan I tahun 2022 sebesar 69.34 % (realisasi 56.16 % dari target 81 %) dengan kriteria “Kurang”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Turunnya capaian indikator kinerja TW 1 tahun 2022 tersebut dipengaruhi oleh belum tercapainya target indikator kinerja TW 1 tahun 2022 dipengaruhi oleh banyaknya sampel kosmetik hasil sampling targeted yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga menyebabkan persentase obat yang memenuhi syarat sangat rendah. Selain itu

terdapat beberapa sampel obat tradisional tidak memenuhi syarat uji, produksi dari produsen dengan Riwayat TMS. Dari 137 sampel targeted yang masuk laboratorium, yang sudah selesai diuji sebanyak 73 sampel (53.28%) namun yang memenuhi syarat hanya sebesar 29.92%.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi

Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Hal ini akan menimbulkan efek jera pada pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi temuan pelanggaran.

Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta agar mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman bagi Kesehatan.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)*

Tindak lanjut dari rekomendasi periode sebelumnya yaitu pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang Obat Tradisional dan Kosmetik. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin mengadakan Bimbingan Teknis untuk para pelaku usaha. Namun dengan adanya relaksasi dalam evaluasi pre market, khususnya untuk kosmetik yang pendaftarannya hanya melalui notifikasi, hal ini menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya mengurangi jumlah produk yang tidak memenuhi ketentuan.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022*

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	92,31	111,22	SANGAT BAIK

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted* / *purposive* di tahun

berjalan. **Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.**

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

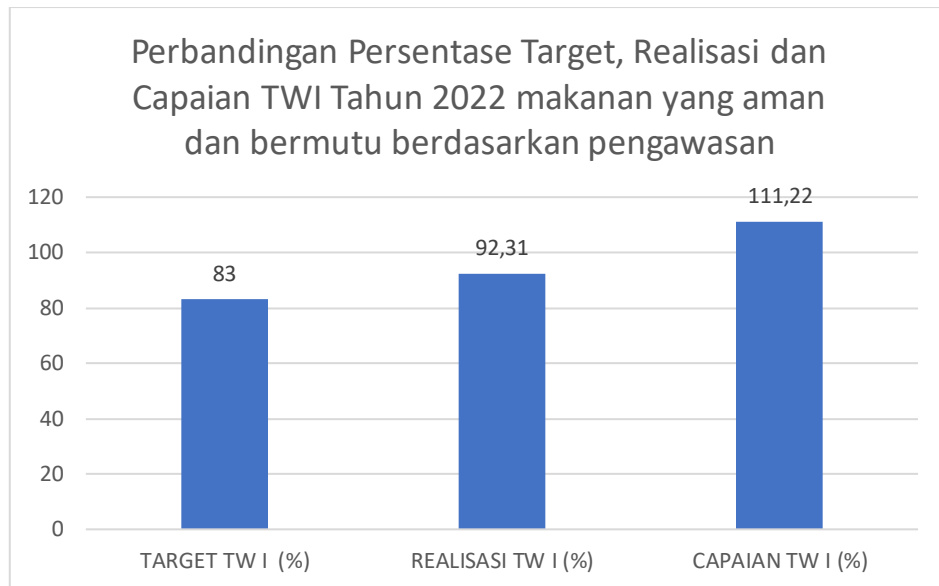
$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil dari Balai Penguji untuk memperoleh poin d.5.
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji. \
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022

Persentase Capaian dan Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta triwulan I tahun 2022 adalah sebesar 111.22 dan 92.31 **diatas target triwulan I** yang ditetapkan yaitu 83 % dengan kriteria **“Sangat baik”**.



Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020 dan masih digunakan di tahun 2022. Data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Persentase Capaian dan Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I tahun

2022 adalah sebesar 111.22% dan 92.31% nilai diatas target TWI yang ditetapkan yaitu dengan capaian 83 %, masuk dalam kriteria sangat baik.

Persentase Capaian dan realisasi sampel makanan yang aman dan bermutu sudah memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak. Berdasarkan hasil pengujian kimia dan mikrobiologi di TW I, dari 13 sampel yang diuji terdapat 11 sampel target kasus dan 2 sampel target pemahit. Dari 11 sampel target kasus tersebut ada 1 sampel yang tidak memenuhi syarat yaitu sampel kemasan pangan polikarbonat. Pada TW I laboratorium pangan dan bahan berbahaya menerima sampel target kasus kemasan pangan dalam jumlah banyak karena hal ini berkaitan dengan wacana BPOM dalam menetapkan regulasi terkait kemasan pangan. Adanya wacana Badan POM terkait dengan regulasi kemasan pangan polikarbonat pengujian kemasan pangan menjadi perhatian BBPOM di Jakarta khususnya Laboratorium pangan dan bahan berbahaya, dengan meningkatkan kemampuan uji baik SDM dan menambah jumlah metoda uji yang akan digunakan.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten menjadi konsen utama dalam peningkatan dan monitoring mutu hasil pengujian. Pengembangan metode analisis yang sesuai trend produk yang beredar juga dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi personil baik lama

maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal. Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil pengujian dalam kinerjanya juga dilakukan dengan mengikuti uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal.

Cara penyamplingan yang baik dan benar yang disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan untuk mendapatkan data yang optimal untuk wacana regulasi kemasan pangan. Tim pemeriksaan secara rutin melakukan kegiatan berikut :

- Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Jakarta

a. Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	94,59	106,28	BAIK

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

- a. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan.
- b. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.
- c. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar KIO_3 , $NaCl$, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar KIO_3 sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS.

Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

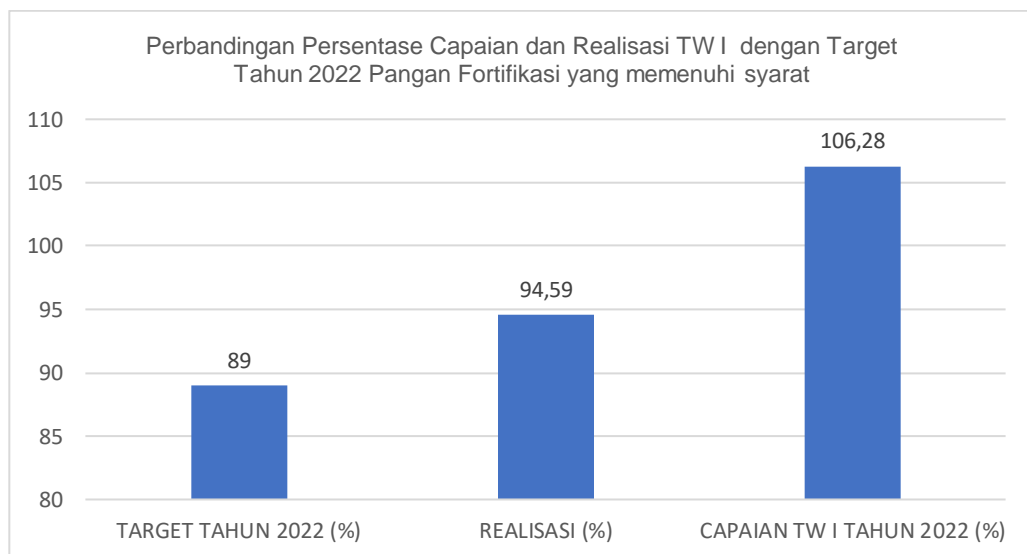
- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d.5 dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- f) Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyamplling.
- g) Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyamplling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

b. Perbandingan Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022



Gambar 8. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 Capaian dan realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Triwulan I tahun 2022 sebesar 106.28%

dan 94.59%. Capaian dan Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat melebihi target Tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Pada tahun 2021 ini, IKU “Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” merupakan tambahan IKSK 1 dari SK1 (Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat), dengan memisahkan pangan fortifikasi dari IKU “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”.
- Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2022 berada diatas target yang ditetapkan dan capaian pangan fortifikasi masuk dalam kriteria “baik“. Berdasarkan hasil evaluasi pengujian kimia di TW I, jumlah pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 35 sampel (94.59%). Produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 sampel (5.41%) yaitu 2 sampel garam dengan parameter yang diuji adalah penetapan kadar KIO3.
- Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, antara lain:

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (*CAPA*) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi dengan peningkatan kompetensi dan metode uji ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak eksternal. Pada tahun 2022 mulai digunakan metode uji identifikasi Fe elektrolitik (FeO) sebagai skrining awal untuk mendeteksi Fe elektrolit yang tidak boleh terkandung dalam pangan fortifikasi tepung terigu.

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi garam juga ditingkatkan dengan mulai menggunakan metode uji potensiometri yang lebih akurat dibandingkan metode titrimetric secara manual.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kemampuan uji. Sebagai contoh untuk tahun 2022 ini telah mulai dilakukan uji skrining awal Fe elektrolitik dan penggunaan potensiometri untuk penetapan kadar NaCl dalam garam.

Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji dalam kinerjanya juga tetap dilakukan dengan mengikutsertakan penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang.

Peningkatan ruang lingkup pengujian terus menerus ditingkatkan melalui verifikasi metode analisis, Uji profesiensi,

Uji Kolaborasi antar laboratorium dan Uji Banding antar personel dan Laboratorium

Dari pencapaian 5 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI\ 5}{5}$$

5

$$NPS = \frac{94.36 + 100.59\% + 63.34\% + 111.22\% + 106.28\%}{5}$$

5

$$NPS = 96.36\%$$

Dengan NPS 96.36%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

a. Matriks Perbandingan target triwulan I dan realisasi serta capaian triwulan I tahun 2022

Tabel 2. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	76,65	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan

Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- 3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan. Pengukuran indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45

Kategori	Interval Indeks
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2022, sehingga pada triwulan I belum ada realisasi dan capaian.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indicator yang diukur tahunan, sehingga realisasi dan capaian triwulan I belum dapat dihitung.

c. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya yaitu diperlukan kegiatan publikasi yang lebih masif terkait berbagai program BBPOM di Jakarta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan pesan utama untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan sehingga masyarakat mengetahui program pengawasan dan dapat merasakan dampak atas kinerja BBPOM di Jakarta dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Berbagai upaya akan dilakukan agar target indeks dapat tercapai di akhir tahun 2022. Salah satunya yaitu publikasi program dan capaian kinerja BBPOM di Jakarta baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak/elektronik serta media social

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. *Perbandingan target dan realisasi tahun 2022*

Tabel 10. Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERI A
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87,70	-	-	-	-

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan pelaku usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara survei mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM dengan judul Pedoman Survei Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2021

Target dinyatakan dalam angka. Indeks Kepuasan Pelaku usaha di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Teknis pengumpulan data mengacu pada pedoman terbagi atas cara setelah kegiatan bimbingan langsung petugas memberikan link kuisioner yang dapat diakses oleh peserta melalui link <https://surveiprkom.pom.go.id>.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya peningkatan target nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha yang diberikan kepada Balai Besar POM di Jakarta pada akhir tahun 2022, yang semula sebesar 86.5 menjadi 87.7

2. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan, antara lain diselenggarakan *desk CAPA*, diskusi terkait perbaikan dokumen permohonan izin penerapan CPPOB, *desk* registrasi, baik secara luring maupun daring

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha pada tahun ini Balai Besar POK di Jakarta, secara kontinu melaksanakan *desk* ataupun diskusi terkait e-CPPOB untuk berkomunikasi kepada pelaku usaha terhadap dokumen yang telah disampaikan melalui system e-CPPOB

Balai Besar POM di Jakarta secara intensif melakukan kegiatan Kerling Jakarta dan Sultan Betawi untuk memberikan informasi bagi pelaku usaha. Kerling Jakarta merupakan kegiatan jemput bola di mana tim Balai Besar POM di Jakarta mengunjungi lokasi-lokasi kantor Walikota di lima Wilayah Kota Administrasi, sedangkan untuk Sultan Betawi layanan diberikan di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, semua ini dilakukan dalam rangka memudahkan pemberian layanan kepada pelaku usaha.

Kegiatan desk registrasi yang diselenggarakan bersama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang pada triwulan pertama 2022 telah diselenggarakan sebanyak dua kali

Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk memperluas layanan terhadap UMKM

Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh BBPPOM di Jakarta kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both BBPOM di Jakarta yang berda di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan Balai Besar POM di Jakarta meningkat seiring dengan banyaknya pelaku usaha yang mendapatkan feedback segera dari Balai Besar POM di Jakarta

Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pelayanan Balai Besar POM di Jakarta juga meningkat dengan diselenggarakannya pelayanan prima dalam bentuk desk CAPA, diskusi terkait perbaikan dokumen dalam rangka permohonan izin penarapan CPPOB maupun desk registrasi

Kegiatan fasilitasi pelaku usaha UMKM pangan, produksi obat tradisional dan produksi kosmetik juga dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Jakarta

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	76,65	-	-	

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 masih berada di bawah target kinerja. Kondisi pandemi Covid-19 secara tidak langsung menjadi salah satu faktor BPOM lebih dikenal masyarakat melalui informasi keamanan vaksin, pemberian izin EUA (*emergency use authorization*), informasi mengenai Obat Covid-19, Suplemen Kesehatan, dan Obat Tradisional untuk peningkatan daya tahan tubuh di masa pandemi dan penyediaan laboratorium untuk pengujian Covid-19 serta penyuluhan terkait perilaku hidup sehat di era *new normal*. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu meningkat serta diikuti oleh ekspektasi terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

yang tinggi, sehingga indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta belum mencapai target yang ditetapkan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu melalui intensifikasi publikasi berbagai program pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan lintas sektor dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah DKI Jakarta, konsultasi publik, pemanfaatan *subsite* dan media sosial melalui berita aktual dan infografis yang menampilkan informasi mengenai kinerja pengawasan yang lebih menarik.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang tercapainya indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 antara lain:

- 1) Penerapan inovasi peningkatan kinerja, seperti LAILA (Layanan Informasi dan Pengaduan melalui Aplikasi *Whatsapp*), None Sisi (Layanan Konsultasi Sertifikasi *Online*), Laron Baja (Verifikasi Lartas *Online* Kiriman melalui Bea Cukai Pasar Baru), Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyajikan infografis di media sosial BBPOM di Jakarta, Kerling Jakarta (Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) dan Sultan Betawi (Loket konsultasi dan layanan informasi

sertifikasi di Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta) yang memberikan kemudahan masyarakat dalam menggunakan layanan yang ada di BBPOM di Jakarta sehingga masyarakat dapat merasakan dampak secara langsung dari kinerja pengawasan BBPOM di Jakarta.

- 2) Terselenggaranya program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti intensifikasi pengawasan dan Razia Obat dan Makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar, dan produk illegal serta program pemberdayaan masyarakat melalui program Prioritas Nasional keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta, yaitu program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang langsung memberikan pembinaan dan bimbingan teknis praktik keamanan pangan kepada komunitas kelurahan, pasar, dan sekolah.

e. Evaluasi Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Untuk dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masa mendatang, diperlukan kegiatan publikasi yang lebih masif terkait berbagai program BBPOM di Jakarta yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan pesan utama untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan sehingga masyarakat mengetahui

program pengawasan dan dapat merasakan dampak atas kinerja BBPOM di Jakarta dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi serta capaian triwulan I

Tabel 3. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	91	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan,

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% terhadap responden yaitu Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$Indeks = \frac{I_i - I_{min}}{I_{maks} - I_{min}} \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke- i

I_{min} = skor faktor minimal

I_{maks} = skor faktor maksimal
 n = banyaknya responden

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2022, sehingga pada triwulan I belum ada realisasi dan capaian.

b. Perbandingan reasisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diukur secara tahunan sehingga realisasi dan capaian triwulan I belum dapat dihitung.

c. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi perbaikan hasil SKM tahun 2021, terdapat beberapa rencana tindak lanjut terkait persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur serta produk spesifikasi jenis pelayanan antara lain:

- 1) Peningkatan kompetensi petugas layanan, khususnya terkait teknik komunikasi yang baik sehingga aliran informasi dapat lebih persuasif.
- 2) Menyediakan sarana komunikasi yang memadai untuk memudahkan petugas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan kaji ulang terkait dokumen standar pelayanan publik secara internal dan melakukan dengar pendapat dengan pihak *stakeholder* untuk mendapatkan saran perbaikan.
- 4) Sosialisasi prosedur/alur pelayanan secara lebih luas kepada masyarakat menggunakan media sosial serta kanal informasi lain.
- 5) Melakukan kaji ulang terkait *timeline* yang ditetapkan secara internal.

- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian standar

Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 12. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90.28	100.3	BAIK

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

Pelaku usaha;

Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

- (1) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- (2) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

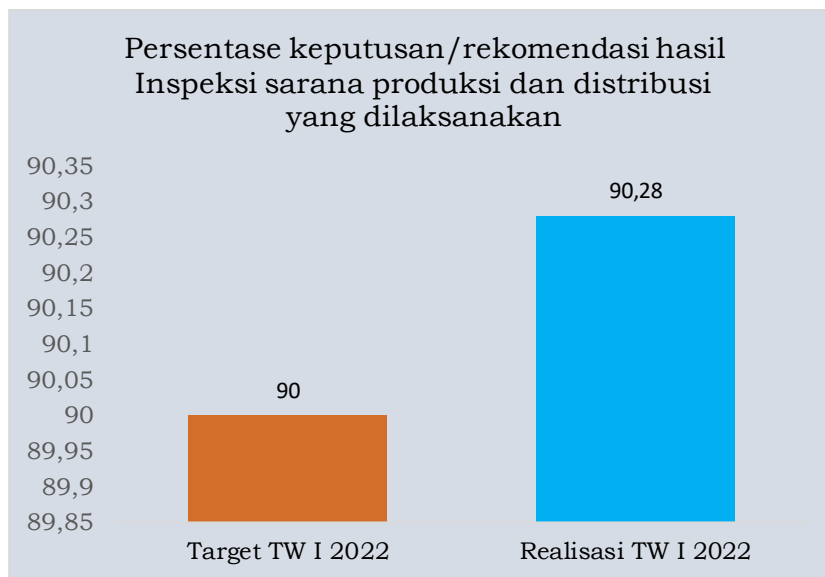
- (3) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- (4) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

b. Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Tahun 2022



Gambar 10. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW 1 tahun 2022 (90.28 %) melebihi dari target yang ditetapkan (90 %) dengan capaian kriteria BAIK (100.3 %).

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Turunnya capaian indikator kinerja TW 1 tahun 2022 dibanding TW 1 tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh:

- Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan, sudah sesuai timeline yang ditetapkan.
- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan sudah sesuai.
- Kecepatan respon dari Pusat terhadap rekomendasi dari BBPOM di Jakarta sudah meningkat karena BBPOM di Jakarta aktif melakukan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindak lanjut dari rekomendasi Balai maupun Laporan dari Balai

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta.
- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya. Diperlukannya monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 13. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	78,13	98,90	BAIK

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha;

2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

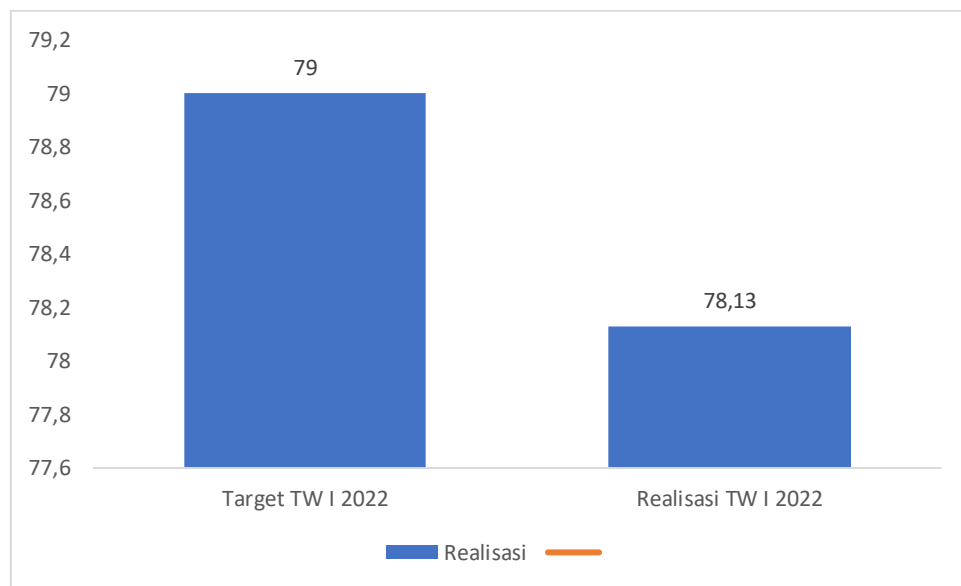
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepalalintas sektor}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target 2022



Gambar 11. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78.13 % adalah kurang dari target yang ditetapkan yaitu 79 %. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 98.89 % dengan kriteria “BAIK”, sehingga diperlukan peningkatan di triwulan berikutnya agar realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Semakin banyak jumlah respon dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang dikirim BBPOM di Jakarta maka akan semakin tinggi capaian indikator kerjanya.
- Semakin banyak tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor maka akan semakin tinggi juga capaian indikator kerjanya. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait, melalui aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta juga dengan BPOM pusat, sudah berjalan dengan baik sehingga semakin meningkatnya pembinaan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan terhadap sarana PIRT yang melanggar.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kurang dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan misalnya sarana IFP/IFK dan sarana distribusi lain di wilayah DKI Jakarta.
- Mengirimkan surat rekomendasi (hardcopy) kepada Suku Dinas Kesehatan terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana.

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87	88,78	102,05	BAIK

Tabel 14. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT SK
- (7) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

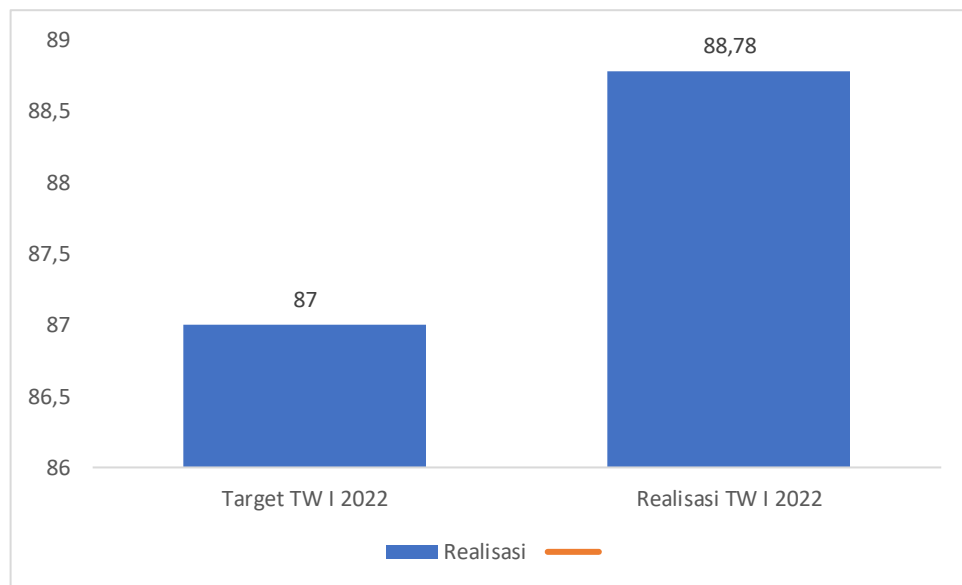
Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022



Gambar 24. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi
Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut. Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan yang masuk. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari subkelompok substansi inspeksi. Namun dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta inovasi yang ada pada tata laksana kegiatan sertifikasi yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat melebihi target yang telah ditetapkan

Adanya perubahan sistem pengajuan permohonan yang saat ini melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang

diberlakukan sejak akhir tahun 2021 yang lalu merupakan tantangan tersendiri baik bagi pelaku usaha maupun bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk memberikan pelayanan. Dengan berlakunya system yang baru ini masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dan bingung bagaimana mengatasinya. Begitu juga dengan petugas

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2021 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain

1. Balai Besar POM di Jakarta telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi petugas Balai Besar POM di Jakarta dengan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persamaan persepsi diantara petugas Balai Besar POM di Jakarta
2. Fasilitasi UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika dapat meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM membuat proses sertifikasi pada UMKM lebih cepat.
3. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat

pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. *Desk CAPA* sampai dengan triwulan satu 2022 diselenggarakan pada 28 April 2022 yang dilakukan secara luring. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan.

4. Selain *Desk CAPA* dalam rangka pelayanan prima BBPOM di Jakarta juga menyelenggarakan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen Izin Penerapan CPPOB. Dengan diadakan pelayanan ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih paham terkait dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Izin Penerapan CPPOB. Pada triwulan pertama diskusi tersebut telah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 10 Januari 2022 dan 25 Februari 2022
5. Kerling Jakarta Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk meningkatkan persentase proses yang tepat waktu
6. Sultan Betawi yaitu loket Balai Besar POM di Jakarta pada mall Pelayanan Publik. Sehingga pelaku usaha dapat berkonsultasi tidak harus ke Balai Besar POM di Jakarta
7. Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun sistem monitoring melalui *spread sheet* untuk memantau permohonan yang masuk sampai dengan diterbitkannya

rekomendasi oleh Balai Besar POM di Jakarta sehingga kinerja disetiap tahapan dapat terukur.

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

1. Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan
2. Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan upaya perbaikan

1. Dengan telah dilakukannya Bimbingan Teknis bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persamaan persepsi diantara petugas Balai Besar POM di Jakarta maka kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lebih cepat sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat.

2. Akan terus dilakukan program *desk CAPA* maupun diskusi perbaikan dokumen persyaratan CPPOB yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya *desk CAPA* akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran *desk CAPA* adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian *CAPA*
3. Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan *sharing knowledge* antara petugas di Kelompok subtransi Pemeriksaan dan Kelompok subtransi Infokom

13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 15. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	77,46	122,95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022



Gambar 12. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta **sudah melebihi target** yang ditetapkan yaitu 122.95 % dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa sebanyak 77.46 % sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah berhasil memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan Badan POM yaitu sebesar 63 %.

Hal ini disebabkan karena tidak ditemukan beberapa temuan yang kategori kritis dan mayor lebih dari 5 di sarana produksi, karena tingkat kepatuhan pelaku usaha produksi terhadap ketentuan yang berlaku sudah meningkat.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 77.46 % **sudah melebihi target** yang ditentukan (63 %). Hasil pemeriksaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan TW 1 tahun 2022 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	4	3	1
2.	Fasilitas Bahan Baku	0	0	0
3.	Fasilitas Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	1	1	0
4.	Industri Obat Tradisional (IOT)	1	0	1
5.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
6.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	7	7	0
7.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3	2	1
8.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
9.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	1	0	1
10.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
11.	Industri Kosmetik	1 5	15	0
12.	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0	0	0
13.	Industri Pangan	2 1	16	5
14.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1 7	10	7
TOTAL		70	54	16

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Dari uraian capaian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian memenuhi ketentuan yang rendah banyak pada UMKM yaitu Industri Rumah Tangga Pangan dan juga di Industri Pangan, karena tahun 2022 ini mayoritas industry pangan yang diperiksa adalah dari kategori pangan UMKM yang mendapat program fasilitasi MD.
2. Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi cara produksi yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya dan kendala perekonomian.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM.
- ✓ Kemampuan Sumber daya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah di Propinsi DKI Jakarta.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan tahun selanjutnya:

1. Pelatihan aspek GMP misal pelatihan Food Inspektur dll untuk petugas Balai untuk meningkatkan kompetensi dan keseragaman petugas

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan inspektur GMP. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- *Desk CAPA (corrective action preventive action)* atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan 1 tahun 2022, capaian lebih dari target yang ditetapkan, tetapi kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sehingga dengan hasil ini bisa belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja dan menunggu data Triwulan berikutnya.

14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 17. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	75	75	88,52	118,03	SANGAT BAIK

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

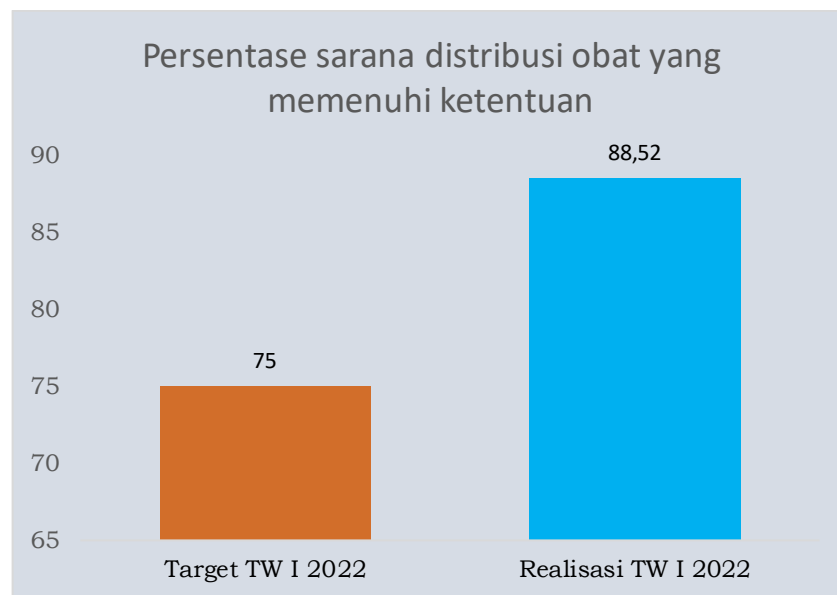
$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target 2022



Gambar 13. Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 118.03 % dengan kriteria “SANGAT BAIK”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 88.52 % sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai Besar

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Hasil

pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2022 Triwulan 1 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	14	13	1
2.	Apotek	22	20	2
3.	Toko Obat	8	7	1
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	3	3	0
5.	Rumah Sakit (RS)	17	14	3
6.	Puskemas	31	31	0
7.	Klinik	15	8	7
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9.	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0
10.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	17	17	0
11.	Fasilitas Distribusi	2	2	0

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
	Suplemen			
12.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	30	24	6
13.	Klinik Kecantikan	0	0	0
14.	Fasilitas Distribusi Pangan	24	23	1
TOTAL		183	162	21

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.
- Intensifnya pemeriksaan sarana pengelola vaksin Covid-19 (Puskesmas dan RS) sehingga kepatuhan juga meningkat

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan:

- a. Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada dan menerapkan sanksi yang lebih tegas seperti jika masih ditemukan produk tanpa izin edar, rusak, kedaluwarsa maka diberikan sanksi Peringatan Keras dan produk dimusnahkan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Kurangnya pengetahuan pelaku usaha seperti terkait peraturan yang berlaku

Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Memaksimalkan penerapan system online yang ada sehingga kendala Sumber Daya dapat diatasi.
2. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhapa pencapaian *output*.

- d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.

- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.
- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan 1 tahun 2022, capaian lebih dari target yang ditetapkan, tetapi kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sehingga dengan hasil ini bisa belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja dan menunggu data Triwulan berikutnya.

15. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi serta capaian triwulan I

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Tabel 4. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta	4,28	-	-	-	-

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)

3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	B	Pelayanan Prima

Hasil penilaian UPP BPOM akan dilakukan pada akhir tahun 2022, sehingga pada triwulan I tahun 2021 ini belum ada realisasi dan capaian.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator tahunan sehingga realisasi dan capaian triwulan I belum dapat dihitung dan dibandingkan dengan target tahun 2022.

c. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Rekomendasi perbaikan kinerja Indeks Pelayanan Publik periode sebelumnya meliputi penerapan kebijakan pelayanan publik secara konsisten dengan perbaikan yang terus-menerus. Inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik BBPOM di Jakarta. Sistem apresiasi terhadap petugas pelayan publik berupa pemberian *reward* serta *punishment* sebagai sanksi apabila standar pelayanan publik tidak terlaksana dengan baik perlu diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan agar target indeks pelayanan publik tahun 2022 dapat tercapai

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi serta capaian triwulan I

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan/pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	23.33	94.54	100.15	BAIK

Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Tahapan Pendampingan UMKM

- Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Seleksi UMKM	Jan-Maret	10
2	Bimtek CPPOB	April-Mei	20
3	Fasilitasi Pendampingan	Jun-Sept	40
4	PSB/Sertifikasi CPPOB	Okt-Nov	20
5	Pelaporan ke Badan POM	Des mgg ke-2	10

- Obat Tradisional

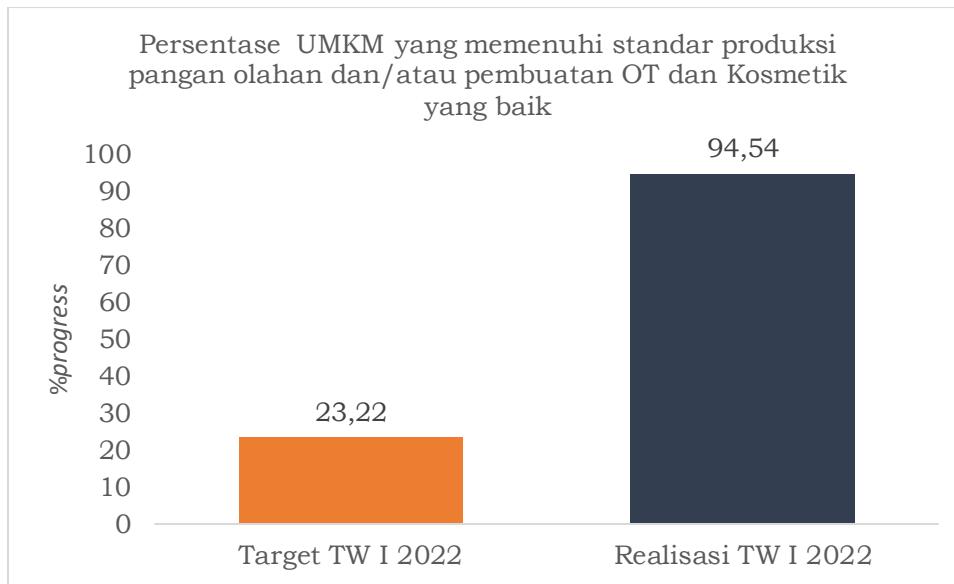
No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

- Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Persentase Capaian dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan/pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan I tahun 2022 sebesar 100,15 % dan 94,54% **diatas target** TW I Tahun 2022 yang ditetapkan yaitu 23,33% dengan kriteria **“baik”**.



c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan

1. Terjadinya pandemic Covid-19 di awal tahun 2020, di mana pemerintah menetapkan pembatasan kegiatan sehingga membuat kegiatan visitasi UMKM sedikit terhambat
2. Pelatihan bagi fasilitator Balai Besar POM di Jakarta yang tidak tepat waktu oleh Pusat sehingga waktu pelaksanaan Bimtek di Balai bagi pelaku usaha mengalami penundaan waktu
3. Terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada fasilitasi tahun 2022 oleh Balai Besar POM di Jakarta
2. Melakukan percepatan visitasi dan penggalangan komitmen bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada tahun 2022
3. Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak peaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD)
4. Adanya kegiatan falitiasi UMKM produksi obat tradisional dan produksi kosmetik yang mulai diadakan tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM Pangan yang dapat difasilitasi
5. Untuk mengatasi terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta melakukan pembentukan fasilitator yang merupakan pendamping JakPreneur dari Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya dan upaya perbaikan

Balai Besar POM di Jakarta telah menginisiasi audiensi dan Forum Grup Dissussion (FGD) untuk melakukan kolaborasi

bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta pada awal tahun 2022 dan terus berkomunikasi dengan lintas sektor untuk memastikan setiap tahapan perencanaan kegiatan dapat berlangsung.

Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Dinas PPKUM melakukan visitasi daring maupun luring untuk melakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang memungkinkan untuk difasilitasi dalam waktu dekat. Visitasi bertujuan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam mempersiapkan tempat produksi sehingga diharapkan fasilitasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran

Besar POM di Jakarta mengadakan pelatihan fasilitator UMKM yang berasal dari personil Jakpener dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam membantu pelaku usaha dalam menerapkan sistem CPPOB sehingga pelaku usaha dapat segera memperoleh izin penerapan CPPOB sebagai persyaratan pembuatan akun perusahaan pada system sertifikasi produk pangan Badan POM

Dari pencapaian 7 target indikator pada sasaran strategis 4 maka dapat dihitung nilai pencapaian sarasannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI\ 5 + NPI6 + NPI7}{7}$$

$$NPS = \frac{100.31 + 98.90\% + 102.05\% + 112.95\% + 118.03 + NPI6 + 71.45\%}{7}$$

$$NPS = 87.67\%$$

Dengan NPS 87.67%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi serta capaian triwulan I

Tabel 5. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	94,4	94,4	94,54	100,15	Baik

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01-75,00	Cukup Efektif
75,01-85,00	Efektif
85,01-95,00	Sangat Efektif
95,01-100	Sangat Efektif Sekali

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan I tahun 2022 diperoleh nilai **94,54 (Sangat Efektif)** telah melampaui target triwulan I sebesar **94,4** dengan capaian sebesar **100,15% kriteria Baik**. Nilai ini diperoleh dari 73 responden survei yang merupakan masyarakat yang telah terpapar kegiatan KIE Obat dan Makanan selama periode triwulan I tahun 2022 meliputi kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan serta Advokasi Terpadu Keamanan Pangan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Relisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta triwulan I tahun 2022 diperoleh sebesar **94,54 (Sangat Efektif)**. Apabila dibandingkan dengan target 2022 sebesar **94,4**, nilai realisasi telah melampaui target dengan capaian sebesar **100,15% dengan kriteria kinerja Baik**.



c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

BBPOM di Jakarta Triwulan I tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, sebanyak 2 (dua) titik di Wilayah DKI Jakarta yaitu pada 29 dan 31 Maret 2022 dengan total peserta sebanyak 500 orang dengan metode KIE tatap muka.



Gambar 1 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat

- 2) Terselenggaranya kegiatan Advokasi Terpadu Keamanan Pangan yang mengawali pelaksanaan program intervensi keamanan pangan Desa Pangan Aman, Pangan Jajanan yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS), dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 22 Maret 2022 yang dihadiri oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait program keamanan pangan.



Gambar 2 Kegiatan advokasi terpadu keamanan pangan

- 3) Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan I tahun 2022 ini antara lain:

- 1) Metode KIE secara tatap muka yang dinilai efektif dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat serta meningkatkan pula keterlibatan dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Obat dan Makanan.
- 2) Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, dan Twitter).

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Sebagai evaluasi dari pelaksanaan KIE tahun sebelumnya, diperlukan tindak lanjut baik pada pelaksanaan teknis KIE yang ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan dengan melakukan analisis terhadap hasil survei kepuasan pelaksanaan KIE sehingga dapat dijadikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KIE selanjutnya. Selain itu, koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi BPOM sebagai pengolah survei tingkat efektivitas KIE terus

ditingkatkan sebagai bentuk pemantauan terhadap pelaporan dan input data survei.

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Aman

a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi serta capaian triwulan I

Tabel 6. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	65	30% <i>(progress)</i>	20% <i>(progress)</i>	66,67	Kurang

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, dan sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

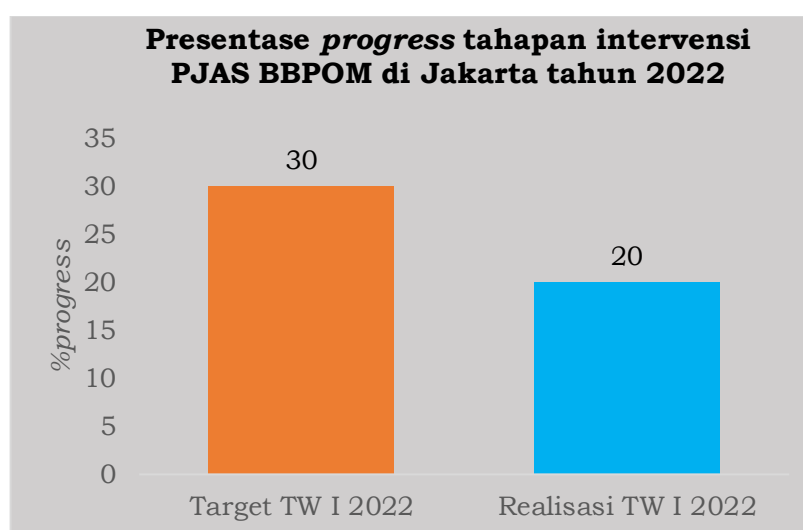
- 4) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- 5) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
- 6) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS aman seperti dijelaskan di atas. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 1-TW 2)

4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%) 	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawasan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
Total Skor		100 %	



Realisasi *progress* tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan I tahun 2022 adalah sebesar **20%** dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Lintas Sektor PJAS yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis

Komunitas pada 22 Maret 2023. Target *progress* capaian tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan I tahun 2022 seharusnya **30%**, sehingga diperoleh **capaian sebesar 66,67% dengan kriteria kinerja Kurang.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase *progress* tahapan intervensi, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah sekolah sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab belum tercapainya target kinerja program intervensi PJAS pada Triwulan I tahun 2022 ini ialah adanya penundaan pelaksanaan kegiatan Advokasi lintas sektor PJAS yang semula direncanakan pada bulan Februari 2022 harus diundur menjadi Maret 2022. Oleh karena itu, pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan juga harus ditunda pelaksanaannya pada triwulan II tahun 2022.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Penundaan kegiatan Advokasi lintas sektor PJAS pada bulan Maret yang semula direncanakan pada bulan Februari ialah karena adanya pemberlakuan PPKM level 3 untuk wilayah DKI Jakarta mengikuti terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19, sehingga pertemuan tatap muka ditiadakan sementara. Pertemuan advokasi lintas sektor ini diselenggarakan secara tatap muka agar koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif. Dengan adanya penundaan kegiatan advokasi, kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan belum dapat diselenggarakan pada Triwulan I dan akan dilaksanakan pada Triwulan II.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Sebagai evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan tahapan intervensi PJAS periode sebelumnya, diperlukan perencanaan kegiatan yang lebih matang serta peningkatan komunikasi dengan lintas sektor dan sekolah target melalui forum komunikasi via *Whatsapp* agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

19. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi serta capaian triwulan I

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan

bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Tabel 7. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21	25% <i>(progress)</i>	25% <i>(progress)</i>	100,00	Baik

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,

3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2022 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 21 kelurahan yang meliputi 7 kelurahan intervensi baru dan 14 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020.

Realisasi tahunan dihitung dari jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Sedangkan realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, <i>rapid test</i> , dll.	5%	Januari-April (TW 1-TW 2)
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli (TW 2-TW 3)
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15%	Mei-Oktober (TW 2-TW 4)
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni-November (TW 2-TW 4)
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	- Pre Intervensi: Mei-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas) - Post Intervensi: November (dapat dilakukan bersamaan dengan

			pengambilan data/survei post intervensi)
7	Monitoring dan Evaluasi	10%	November-Desember (TW 4)
8	Lomba Desa Pangan Aman	5%	Desember
9	Pengawasan	10%	Juni-Desember (TW 2-TW 4)
Total Skor		100 %	



Realisasi *progress* tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan I tahun 2022 ialah sebesar **25%** dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 22 Maret 2022 serta telah diadakannya paket informasi keamanan pangan, *rapid test*, dll. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah mencapai **target Triwulan I yaitu 25% dengan capaian 100,00% kriteria kinerja Baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase *progress* tahapan intervensi, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah desa sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan capaian program Desa Pangan Aman pada Triwulan I ini yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 2 Februari 2022 dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 22 Maret 2022. Dengan adanya sinergisme dan dukungan ini, penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Agar target kinerja dapat tercapai dan terjadi peningkatan kinerja diperlukan perencanaan kegiatan yang lebih baik serta didukung oleh komunikasi yang efektif dengan lintas sektor terkait dalam hal ini kelurahan yang diintervensi, OPD terkait keamanan pangan serta kader dan komunitas kelurahan yang dibentuk

20. Jumlah pasar aman pangan berbasis komunitas

a. Perbandingan target triwulan I dan realisasi serta capaian triwulan I

Tabel 8. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	3	25% <i>(progress)</i>	25% <i>(progress)</i>	100,00	Baik

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

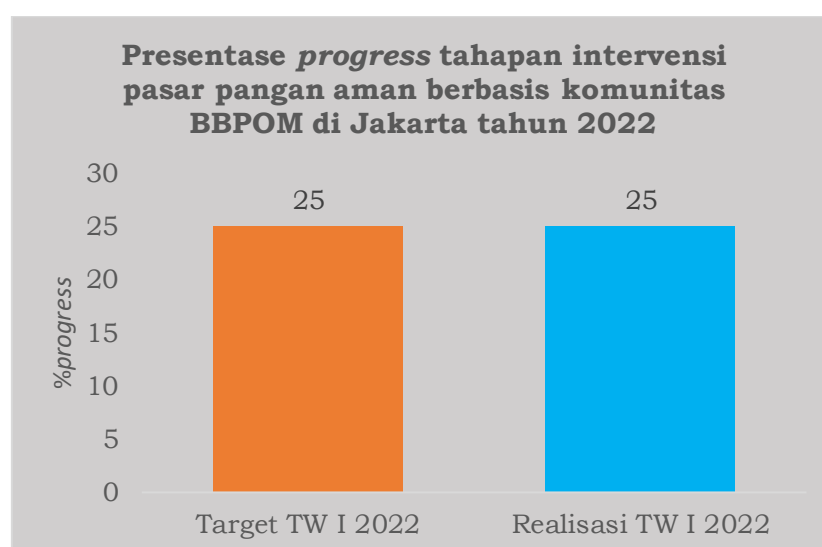
- 1) Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.
- 2) Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022 ialah 3 (tiga) pasar yaitu 1 pasar intervensi baru dan 2 pasar pengawalan intervensi tahun 2020.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Survei Pasar	5%	Januari (TW 1)
3	Bimtek Pengelola Pasar	15%	April-Mei (TW 2)
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	15%	April-Mei (TW 2)
5	Penyuluhan	10%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
6	Kampanye	10%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15%	September- Oktober (TW 3-TW 4)
8	Pengawasan	10%	Februari-Oktober (TW 1-TW 4)
Total Skor		100 %	



Realisasi *progress* tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I tahun 2022 ialah sebesar **25%** dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Desa Pangan Aman pada 22 Maret 2022 serta telah terselenggaranya Survei Pasar pada 9 Maret 2022 ke pasar intervensi yaitu Pasar Lenteng Agung. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman

Berbasis Komunitas telah mencapai **target Triwulan I yaitu 25% dengan capaian 100,00% kriteria kinerja Baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase *progress* tahapan intervensi, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah pasar sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan I tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan *progress* intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas antara lain adanya kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kegiatan sesuai rencana serta adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 22 Maret 2022. Penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum

komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu. Selain itu, kegiatan survei pasar yang dilakukan sebelum pelaksanaan program pada 9 Maret 2022 yang bertujuan untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya dan mengidentifikasi pedagang pasar serta inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam pelaksanaan tahapan intervensi selanjutnya.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar target, contohnya komunikasi efektif melalui forum komunikasi via *Whatsapp* dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring via *Zoom*.

Dari pencapaian 5 target indikator pada sasaran strategis 5, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2} + \text{NPI 3} + \text{NPI 4}}{4}$$

4

$$\text{NPS} = \frac{66.67 + 100\% + 100\% + 117.20\% + 100.15}{4}$$

4

$$\text{NPS} = 91.70\%$$

Dengan NPS 91.70%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 19. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	10	20.40	204	Tidak dapat disimpulkan

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi.

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*.

Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
= $\frac{A+B}{2}$

2

A = $\frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat satu tahun}} \times 100\%$

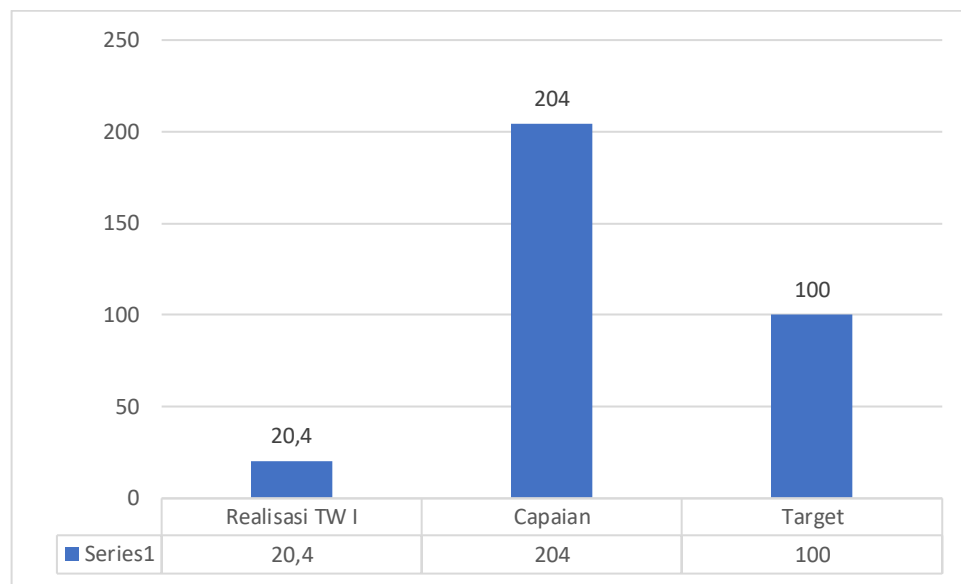
Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).
 - b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022



Gambar 14. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta melebihi target yang ditetapkan yaitu 204.0% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tingginya capaian indikator kinerja TW 1 tahun 2022 tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah sampel mulai tahun 2022 terkait dengan penerapan Regionalisasi Laboratorium. Sampel regional diterima dari BBPOM Bandung, BBPOM Serang, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai tersebut. Sampel

yang diterima saat ini sudah mencapai 569 sampel dan sudah diuji sebanyak 347 sampel (60.98%)

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.

- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 20. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	10	17.47	174.7	Baik

a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*.

b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium.

c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		$= \frac{A + B}{2}$
A	$= \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel makanan satu tahun}}$	$\times 100\%$
B	$= \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel makanan yang masuk laboratorium}}$	$\times 100\%$

ditetapkan dalam pedoman/SO

d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota)

Persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :
 - a) B01-B11 menggunakan target DIPA,
 - b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.
2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :
 - a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).

b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022



Gambar 15. Realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

Realisasi persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada TW I Tahun 2022 sebesar 17.47%, sedangkan capaian persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada TW I Tahun 2022 dibandingkan dengan target tahun 2022 adalah sebesar 17,47 %.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingginya capaian indikator kinerja TW 1 tahun 2022 tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah sampel mulai tahun 2022 terkait dengan penerapan Regionalisasi. Sampel regional diterima dari BBPOM di Bandung, BBPOM Serang, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai-balai tersebut.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Meningkatnya jumlah produk pangan yang beredar di masyarakat dan beragamnya kondimen dan BTP yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi produk pangan menjadi perhatian BBPOM di Jakarta khususnya Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya untuk lebih meningkatkan kemampuan ujinya. Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metoda yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis, mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium.

Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin sehingga kecepatan pengujian tidak terhambat.

Banyaknya sampel kasus yang menjadi isu eksternal dan internal akhir-akhir ini, termasuk juga pengujian kemasan pangan polikarbonat dalam rangka penyusunan regulasi, juga mempengaruhi jadwal uji dan pemenuhan timeline pengujian sampel pengawasan rutin.

Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji juga dilakukan dengan mengikutsertakan personil penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang. Pemanfaatan dan pemenuhan peralatan laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal guna menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengujian

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan

magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.

- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 dan akreditasinya yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.
- Kendala operasional laboratorium untuk program pemeliharaan alat laboratorium tahun 2022 sudah bisa diatasi karena sudah dilaksanakannya program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor) sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya. Program ini diharapkan tetap dapat terlaksana untuk tahun tahun yang akan datang.

Dari pencapaian 2 target indikator pada sasaran strategis 6, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\text{NPS} = \frac{\text{NPI 1} + \text{NPI 2}}{2}$$

$$\text{NPS} = \frac{204\% + 177.4\%}{2}$$

$$\text{NPS} = 190.7 \%$$

Dengan NPS 190.7%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil dalam mencapai sasaran meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

23. Tingkat Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TARGET TW1 2022	REALISASI	% CAPAIAN TW1 2022	KRITERIA
Tingkat keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan	58	10	18,38	180,38	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

Nilai Tingkat Keberhasilan:

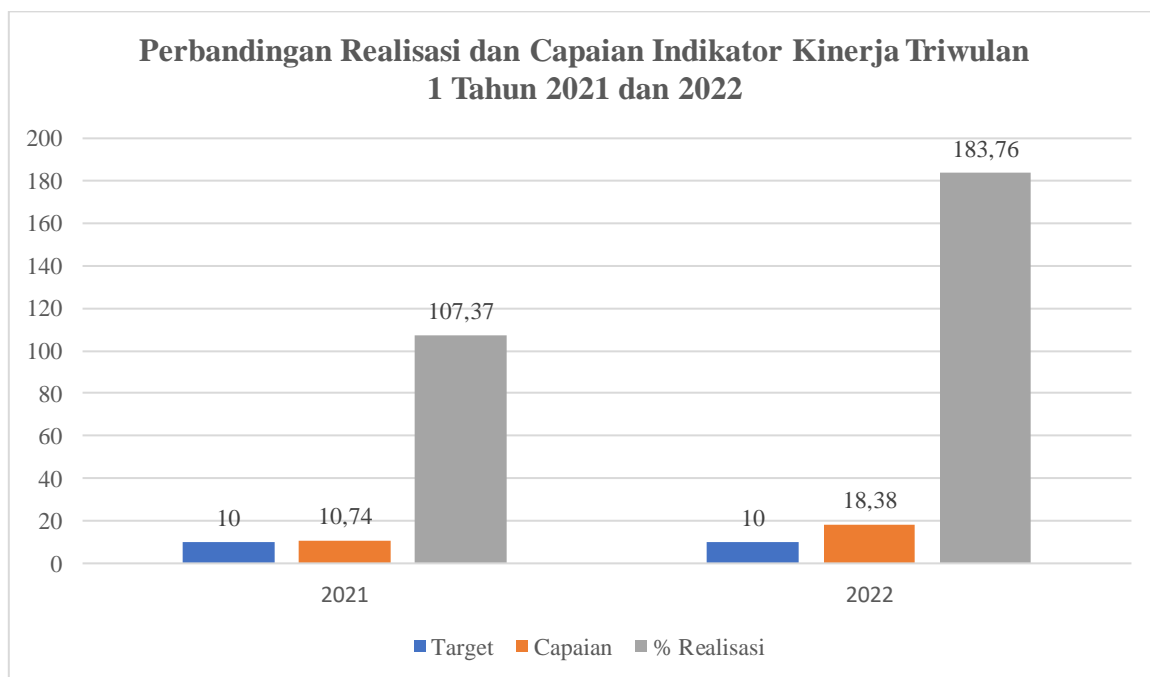
$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode triwulan pertama atau Januari–Maret 2022 adalah **melebihi target** yang ditetapkan yakni tingkat keberhasilan **18,38** dari target tingkat keberhasilan di triwulan pertama 2022 sebesar **10,00** dengan kriteria "**tidak dapat disimpulkan**". Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan pertama atau periode Januari–Maret 2022, Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta **telah berhasil** memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dan 2021 adalah terdapat peningkatan capaian dari 107,37% di tahun 2021 menjadi 180,38% di tahun 2022. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan capaian kinerja yang sangat drastis. Peningkatan di triwulan pertama 2022 ini sebesar 73,01% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Capaian ini terwujud sebagai hasil dari penyelesaian berkas perkara tunggakan dan SPDP atas berkas perkara tahun 2022.



Gambar .. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2021 dan 2022.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisa terhadap keberhasilan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni Menara (Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara). *Spreadsheet* ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring/luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindaklanjutnya.

2. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) yang lebih optimal

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian pada triwulan pertama ini merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat capaian P21 atas beberapa perkara tunggakan. Hal ini menunjukkan perkembangan ke arah

penyelesaian perkara yang mempengaruhi indikator kinerja tahun 2022.

3. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait

Di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber, Poksi Penindakan tetap waspada akan peredaran produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. Pada triwulan pertama ini, dijalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap peredaran pangan olahan mengandung bahan berbahaya. Kerja sama lintas sektor ini dilakukan sejak kegiatan penelusuran dan pendalaman informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penindakan.

4. Pelaksanaan asistensi atau bantuan teknis oleh Deputi Bidang Penindakan yang lebih optimal

Salah satu upaya yang terus dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta dalam penanganan/penyelesaian perkara khususnya perkara tunggakan adalah melalui pelaksanaan asistensi/pemberian bantuan teknis oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat penambahan kegiatan untuk fungsi cegah tangkal di tahun 2022 ini. Dengan demikian, upaya pencapaian kinerja ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan.

Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis terhadap data hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil

pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal. Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, pengaduan masyarakat, dan juga dari akses informasi yang dimiliki. Selanjutnya kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi kegiatan ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

e. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Pencapaian triwulan pertama ini merupakan upaya penerapan rekomendasi perbaikan kinerja di tahun 2022. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan merupakan hasil dari upaya komprehensif kegiatan cegah tangkal, intelijen, siber, hingga penyidikan perkara. Terlepas dari dinamika yang terjadi khususnya dalam perubahan struktur organisasi pada Deputi Bidang Penindakan BPOM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penyesuaian dan peningkatan kompetensi personel kelompok substansi penindakan terus dilakukan.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk mencapai target kinerja yang belum terlaksana di triwulan pertama akan disiapkan untuk dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam dokumen *Plan of Action 2022*.

Dari pencapaian 1 target indikator pada sasaran strategis 7, maka dapat dihitung nilai pencapaian sasarnya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI}{1}$$

1

$$NPS = \frac{183.8}{1}$$

1

$$NPS = 183.3\%$$

Dengan NPS 183.3%, maka Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

24. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 21. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	REALISASI 2022%	REALISASI
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,40			

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM

Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%

2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%
---	---	-----

Realisasi dan capaian untuk indikator ini belum ada dikarenakan akan muncul pada akhir tahun.

25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 22. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 23. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- (2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- (3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- (4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- (5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60

- (6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- (7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Pada triwulan I tahun 2022, nilai AKIP BBPO di Jakarta belum terdapat realisasi dan capaian dikarenakan merupakan penilain diakhir tahun.

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 24. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Indeks Profesionalitas	84,50	-	-	-

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
ASN Balai Besar POM di Jakarta				

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi dan capaian, nilai akan muncul pada akhir tahun.

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 25. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar *GLP* tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	82 %	-	-	-	-

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) atau Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup ≥ 65 ,
- Standar Kompetensi personel laboratorium ≥ 75 ,
- Standar Alat Laboratorium ≥ 70

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP ditetapkan pada akhir tahun, sehingga capaian untuk triwulan 1 tahun 2022 ini belum dapat dihitung.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program / kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisis yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah metode analisis yang harus diverifikasi setiap tahunnya adalah 12 metode analisis kosmetik, 12 metode analisis obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis obat. Dengan kegiatan verifikasi Metode Analisis ini diharapkan persentase pemenuhan ruang lingkup akan meningkat.
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya. Dengan terpeliharanya alat laboratorium maka akan mendukung pemenuhan terhadap standar

peralatan. Pemanfaatan Alat laboratorium secara maksimal dan tepat untuk menjamin kelayakan alat laboratorium juga mendukung hal tersebut.

- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.
- Ikut serta dalam Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium untuk peningkatan ruang lingkup pengujian.

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 26. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal	2.25	2.25	2.2	97.78	BAIK

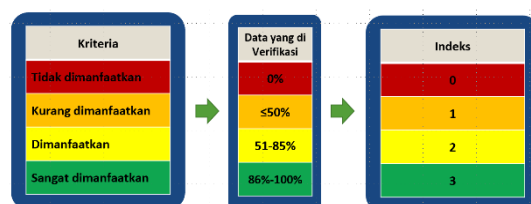
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di *BCC (BPOM Command Centre)*

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem *BCC* yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. *BCC* adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.

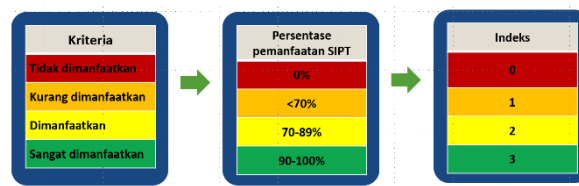
Terdapat data dan informasi dalam sistem *BCC* yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan oleh UPT yaitu SPIMKer (Data Keracunan) dan SIPT. Data kasus keracunan diinput oleh rumah sakit maupun oleh BBPOM di Jakarta melalui aplikasi SPIMKer. Kemudian data tersebut diverifikasi oleh petugas BBPOM Jakarta dengan timeline 30 HK dari tanggal input aplikasi. Cara perhitungan data Spimker sebagai berikut:

$$Spimker = \frac{\text{Jumlah kasus keracunan yang diverifikasi sesuai timeline}}{\text{Jumlah kasus keracunan yang diinput}} \times 100\%$$



SIPT merupakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yang digunakan oleh BBPOM di Jakarta untuk melaporkan hasil pemeriksaan sampel, pengujian sampel dan pemeriksaan sarana kepada Badan POM secara online. Cara perhitungan data SIPT sebagai berikut:

$$SIPT = \frac{\% \text{ pemeriksaan sampel} + \% \text{ pengujian sampel} + \% \text{ pemeriksaan sarana}}{3}$$



2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email*, *sharing folder*, *dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bagian/kelompok substansi maupun individu.

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Badan POM dengan kriteria sebagai berikut:

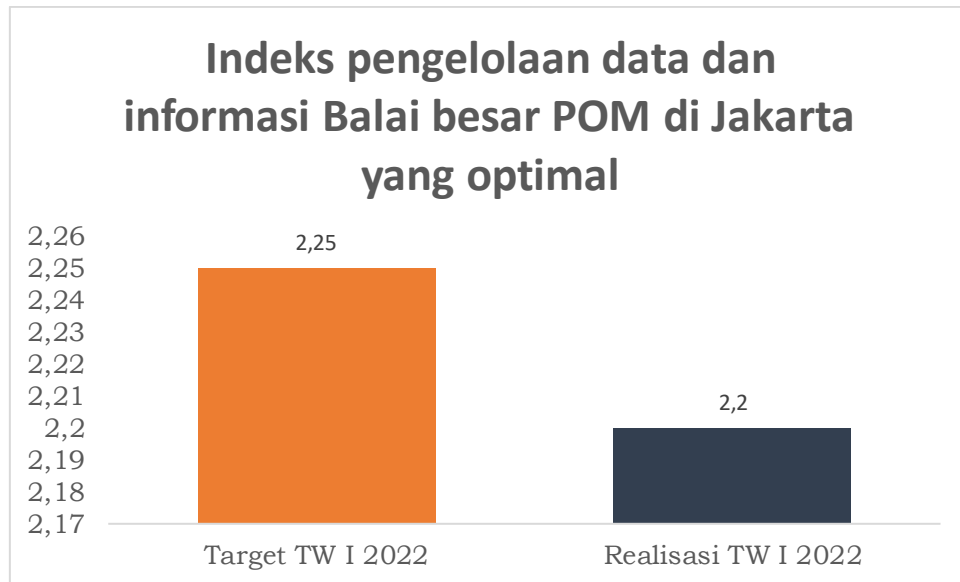
2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022



Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta pada tahun 2022 adalah 2,2 melampaui target 2,25 sehingga diperoleh capaian 97.78% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi di BBPOM Jakarta telah dilakukan dengan optimal. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi mendukung Indikator Badan POM, yaitu Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) yang mendukung Sasaran 10 “Menguatnya laboratorium, riset analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan

egovernment dalam pengawasan Obat dan Makanan” pada *learning and growth perspective*.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemantauan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta dilakukan oleh Tim IT yang memiliki *job description* yang jelas dan tercantum dalam SK Tim IT. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi 2,48 diperoleh dari penilaian komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi (50%):

- *Email* (12,5%) = 3
- Pemanfaatan BOC (12,5%) = 2
- *Sharing Folder* (12,5%) = 3
- Berita Aktual (12,5%) = 3

2. Indeks Data dan Informasi yang Dimutakhirkan (50%):

- Spimker (20%) = 3
 - SIPT (80%) = 2

Berdasarkan data tersebut nampak bahwa pemanfaatan email, *sharing folder* dan berita aktual serta pemutakhiran SPIMKer telah dilakukan secara optimal. Sedangkan pemanfaatan BOC dan pemutakhiran SIPT belum maksimal. Hal ini antara lain disebabkan

oleh perubahan SIPT dari versi 2 ke versi 3 sehingga SIPT baru dapat digunakan secara maksimal pada Triwulan I 2022. Selain itu, nilai pemanfaatan BOC pada Triwulan I 2022 cukup rendah sehingga berpengaruh terhadap nilai akhir tahun karena perhitungan indeks bersifat kumulatif.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, yaitu:

- Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di BBPOM Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi
- Program pemanfaatan email *corporate* secara berkala oleh setiap pegawai dalam pelaporan status kehadiran (WFO/WFH) setiap minggu telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara optimal
- Pemanfaatan *sharing folder* dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk. Pemanfaatan *sharing folder* sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks 3.

- Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/ bulan dengan masing-masing minimal 101 *viewer*/ berita aktual
- Verifikasi dan tindak lanjut petugas Aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal (3)
- Pendampingan Pusdatin dalam penggunaan fitur baru pada SIPT berkontribusi terhadap meningkatnya kompetensi pegawai dalam melakukan penginputan dan pemanfaatan SIPT
- Pengadaan Alat Pengolah Data (APD) pada tahun 2021 juga turut mendukung pengawalan nilai indeks pengelolaan data dan informasi

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

29. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 27. tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2022 (%)	KRITERIA
Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5	77	62,10	80,65	Cukup

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times$$

Kriteria Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu:

- a) NKA > 90% termasuk kategori Sangat Baik;
- b) NKA lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk kategori Baik;
- c) NKA lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk kategori Cukup;
- d) NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk kategori Kurang;
- e) NKA sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk kategori Sangat Kurang,

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencerminkan 4 aspek dan terdiri dari 13 indikator sebagai berikut:

Aspek	Indikator	Bobot
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	5%
	Deviasi Halaman III DIPA	5%
	Pagu Minus	5%
Kepatuhan terhadap Regulasi	Data Kontrak	10%
	Pengelolaan UP dan TUP	8%
	LPJ Bendahara	5%
	Dispensasi SPM	5%
Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	15%
	Penyelesaian Tagihan	10%
	Capaian Output	17%
	Retur SP2D	5%
Efisiensi Pelaksanaan Anggaran	Renkas	5%
	Kesalahan SPM	5%

Kriteria nilai IKPA sesuai dengan Perdirjen Nomor PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 yaitu:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
- b. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
- c. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89;
- d. Kurang, apabila nilai IKPA <70.

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Permenkeu No. 2/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran

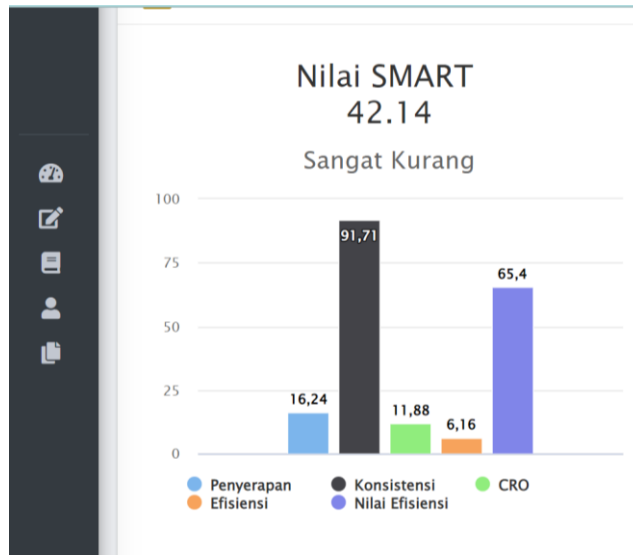
dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator yaitu:

Indikator	Bobot
Penyerapan Anggaran	9,7%
Konsistensi	18,2%
Capaian Realisasi Output	43,5%
Efisiensi	28,6%

Nilai IKPA dan EKA dapat dilihat pada Aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara,

(OMSPAN) atau Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)

Kementerian Keuangan sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini:



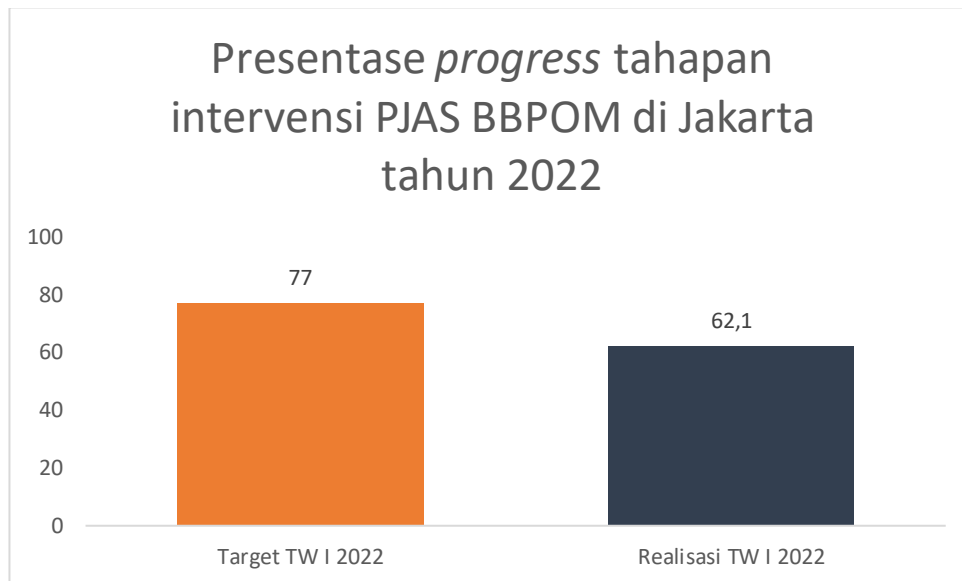
Gambar Nilai IKPA BBPOM Jakarta triwulan I Tahun 2022 pada aplikasi OMSPAN

NO	KODE NPPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	175	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100,00	88,89	77,59	100,00	88,89	100,00	100,00	86,62	64,43	70%	92,05
				Bobot	0	10	0	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	0,00	8,89	0,00	10,00	8,89	10,00	5,00	21,66			
				Nilai Aspek	88,89		97,22					86,62			

Disclaimer:
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Berdasarkan gambar tersebut diatas, pada tahun 2022, nilai EKA adalah 42,14 dan Nilai IKPA adalah 92,05 sehingga diperoleh nilai NKA 80,65. Nilai IKPA masuk dalam kriteria “CUKUP”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022



Gambar 45. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

Berdasarkan gambar tersebut diatas, pada tahun 2022, nilai EKA adalah 42,14 dan Nilai IKPA adalah 92,05 sehingga diperoleh nilai NKA 80,65. Nilai IKPA masuk dalam kriteria “CUKUP”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA (60%) dan nilai IKPA (40%). Proporsi nilai EKA lebih besar dibandingkan dengan nilai IKPA. Berdasarkan data, Nilai IKPA pada tahun 2022 dalam kategori “cukup” yaitu 42,14 dan 92,05.

- a. Revisi DIPA dilaksanakan maksimal 1 kali dalam 1 triwulan
- b. Menghindari pagu minus pada akhir tahun dengan melaksanakan monitoring realisasi anggaran secara berkala
- c. Menyampaikan data perjanjian kontrak kepada KPPN secara tepat waktu. Pada tahun 2021, terdapat 1 data kontrak yang telambat disampaikan kepada KPPN dari total 31 data kontrak.
- d. Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu
- e. Menyampaikan LPJ Bendahara kepada KPPN tepat waktu
- f. Menyampaikan SPM tepat waktu sehingga tidak ada dispensasi SPM
- g. Penyerapan anggaran pada triwulan I, II dan 3 mendekati target dan pada triwulan IV berhasil melampaui target. Target penyerapan triwulan I (15%), triwulan II (40%), triwulan III (60%) dan triwulan IV (90%)
- h. Penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja).
- i. Melaksanakan kegiatan dengan capaian rincian output seduai dengan target rincian output
- j. Menghindari adanya retur SP2D. Terdapat retur 2 SP2D dari total 1014 SP2D pada tahun 2021
- k. Mencegah terjadinya pengembalian SPM karena adanya kesalahan SPM. Pada tahun 2021, terdapat kesalahan 23 SPM dari total 1037 SPM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang berpengaruh positif terhadap nilai kinerja anggaran adalah:

- a. Pelaporan kepada KPPN secara tepat waktu terkait penyampaian data kontrak, LPJ, SPM
- b. Pengalihan beberapa kegiatan dari *onsite* menjadi *daring*, misal pengawasan sarana produksi dan distribusi sehingga mampu berkontribusi terhadap tingkat efisiensi Program Pengawasan dan Pengendalian Lembaga karena realisasi volume outputnya jauh melampaui target
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan realisasi output secara berkala

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan yaitu peningkatan komitmen dan sinergi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan serta bagian pelaporan dan evaluasi. Untuk itu telah dilaksanakan program evaluasi berkala setiap bulan membahas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut perbaikan dengan melibatkan seluruh pengelola kegiatan dan keuangan serta bagian pelaporan.

1.2. Realisasi Anggaran

Pada triwulan I tahun 2022, anggaran pada DIPA BBPOM di Jakarta adalah Rp. 45.606.169.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.811.992.422 atau 12,74%

NO	BA-SATKER	NAMA SATKER	KPPN	KET	JENIS BELANJA										TOTAL		
					PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER				
1	063-432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, JAKARTA	175	PAGU	17.195.714.000	24.197.044.000	4.213.411.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.606.169.000	
					REALISASI	3.389.517.988	2.292.169.996	130.304.458	0	0	0	0	0	0	0	0	5.811.992.422
					PERSENTASE	(19,71%)	(9,47%)	(3,09%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(12,74%)
					SISA	13.806.196.012	21.904.874.004	4.083.106.542	0	0	0	0	0	0	0	0	39.794.176.558
TOTAL				PAGU	17.195.714.000	24.197.044.000	4.213.411.000	0	0	0	0	0	0	0	45.606.169.000		
				REALISASI	3.389.517.988	2.292.169.996	130.304.458	0	0	0	0	0	0	0	5.811.992.422		
				PERSENTASE	(19,71%)	(9,47%)	(3,09%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(12,74%)		
				SISA	13.806.196.012	21.904.874.004	4.083.106.542	0	0	0	0	0	0	0	39.794.176.558		

Gambar 36. Perbandingan pagu, realisasi anggaran, dan capaian realisasi anggaran BBPOM di Jakarta Triwulan I Tahun 2022

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja

1.3. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Tabel 33. Efisiensi kegiatan per Indikator triwulan I tahun 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	76,43	94,35	309.593.550,00	8.800.000,00	2,84	33,19	32,194	81,00
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5	96,06	100,59	162.471.050,00	1.624.345,00	1,00	100,61	99,612	81,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	56,16	69,34	309.593.550,00	30.690.905,00	9,91	6,99	5,995	81,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	92,31	111,21	162.471.050,00	1.624.345,00	1,00	111,24	110,239	81,00
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	#DIV/0!	156.071.850,00	155.850,00	0,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	#DIV/0!	56.977.100,00	4.500.000,00	7,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	#DIV/0!	156.071.850,00	11.980.000,00	7,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	0	0	#DIV/0!	1.111.991.500,00	11.053.130,00	0,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90,28%	1,00	142.442.750,00	14.908.000,00	10,47	0,10	-0,904	75%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	78,13	98,89	142.442.750,00	11.590.000,00	8,14	12,15	11,154	81,00
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	88,78	102,04	120.083.000,00	10.780.000,00	8,98	11,37	10,367	81,00
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	77,46	122,96	39.864.000,00	2.340.000,00	5,87	20,95	19,947	81,00
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	88,52	118,03	188.044.400,00	21.100.000,00	11,22	10,52	9,519	81,00
14	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	0	0	#DIV/0!	160.801.300,00	2.430.000,00	1,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	0	0,00	1.624.100.000,00	98.000.000,00	6,03	0,00	-1,000	75%
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30	20,00	66,67	354.018.000,00	31.340.000,00	8,85	7,53	6,531	81,00
17	Jumlah desa pangan aman	25	25,00	100,00	783.316.000,00	34.400.000,00	4,39	22,77	21,771	81,00
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25	25,00	100,00	100.431.000,00	6.654.000,00	6,63	15,09	14,093	81,00
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	20,40	204,01	265.365.900,00	21.789.000,00	8,21	24,85	23,846	81,00
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	17,47	174,65	146.664.900,00	10.005.000,00	6,82	25,60	24,603	81,00
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	18,38	183,76	1.042.636.000,00	59.425.670,00	5,70	32,24	31,241	81,00
22	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	0	0	#DIV/0!	352.105.500,00	29.076.000,00	8,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	0	0	#DIV/0!	430.407.500,00	34.123.000,00	7,93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	0	0	#DIV/0!	430.407.500,00	980.000,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	#DIV/0!	7.827.731.500,00	67.890.000,00	0,87	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,2000	97,78	315.548.000,00	10.908.000,00	3,46	28,29	27,285	81,00
27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	77	43,81	56,90	352.105.500,00	25.900.000,00	7,36	7,73	6,735	81,00
28	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	94,59	106,29	17.276.000,00	1.760.000,00	10,19	10,43	9,433	81,00
29	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	23,33	16,67	71,44	430.407.500,00	35.090.000,00	8,15	8,76	7,763	81,00

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan input (anggaran) dan kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator pembangun sasaran strategis karena struktur anggaran dan indikator kinerja tidak selaras. Sehubungan tingkat

efisiensi anggaran juga merupakan indikator dalam perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dalam penetapan Nilai Kinerja Anggaran, maka indikator ini tidak akan dievaluasi lagi pada periode tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 10 (sepuluh) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**” ($90\% \leq x < 110\%$); 2 (dua) indikator mencapai kategori “**cukup**” ($70\% \leq x < 90\%$); 4 (empat) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”, 2 (dua) indikator mencapai target dengan kategori “**sangat baik**” ($110\% \leq x < 120\%$) dan terdapat 2 (dua) indikator dengan kriteria “**kurang**” ($< 50\%$).
2. Hasil capaian empat sasaran strategis terbaik dari adalah sebagai berikut:

Nilai pencapaian tertinggi pertama adalah pada sasaran strategis ke-tujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” sebesar 183,8% dan sasaran strategis ke 6 yaitu :Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan rata-rata capaian sebesar 190,7% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

4.1. Saran

Pada tahun 2022 kegiatan banyak terkendala disebabkan oleh adanya virus varian omicron yang terjadi pada awal tahun 2022. Sehingga mengakibatkan banyak kendala pada rencana kegiatan yang disusun diawal tahun dan mempengaruhi capaian di

triwulan I tahun 2022. Rencana kegiatan yang tertunda akan segera ditindaklanjuti pada awal triwulan II

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di
Jakarta Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
	Stakeholder						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83	
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5	
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83	
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86	
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9	

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,30	4,40	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81
		Internal Process					

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
	Learning and Growth						
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
		Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	yang berkinerja optimal						
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	92
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	-	-	-

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Jakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Yudi Noviandi, M.Sc, Tech, Apt



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Jakarta

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.5
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	87
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87.7
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76.65

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.28
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	21
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83.4
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.5
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.5

Lampiran 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Jakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	465.152.450,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	298.193.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	465.152.450,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	298.193.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	50.898.400,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											87		318.225.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											87.7		46.325.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											76.65		371.262.500,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM											91		82.596.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	396.496.750,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	396.496.750,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	295.830.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	160.788.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	632.205.500,00
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM											4,30		371.262.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik											77		85.159.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	2.603.617.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	20	30	30	55	70	70	70	90	90	90	65	767.240.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	0	20	25	25	35	40	50	60	65	70	85	21	1.097.149.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	398.702.100,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	277.407.600,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	5	10	15	20	30	35	40	45	50	55	58	1.444.888.000,00
23.	Indeks RB UPT											83,4		91.936.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											80		54.154.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84,5		27.090.178.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											82		6.770.065.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25			2,25			2,25		2,25		137.915.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			77			80			86		92,5		28.600.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	25	25	40	60	70	70	70	70	90	90	3	110.081.000,00

Lampiran 4. RHPK BBPOM di Jakarta Triwulan I Tahun 2022





No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume				Kriteria
			Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan (%)	
a	b	c	d	f	g	$h=(g/f*100)$	i
1	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	76,43	94,36	BAIK
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5	95,5	96,06	100,59	BAIK
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	56,16	69,33	KURANG
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	92,31	111,22	SANGAT BAIK
		05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	94,59	106,28	BAIK
2	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87	-	-	-	-
3	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7	-	-	-	-
		08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65	-	-	-	-
		09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume				Kriteria
			Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan (%)	
a	b	c	d	f	g	$h=(g/f*100)$	i
4	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90,28	100,31	BAIK
		11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	78,13	98,90	BAIK
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87	88,78	102,05	BAIK
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	77,46	122,95	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	88,52	118,03	SANGAT BAIK
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,3	-	-	-	-
		16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	23,33	16,67	71,45	CUKUP
5	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,54	100,15	BAIK
		18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65	30 (progress)	20 (progress)	66,67	KURANG
		19-Jumlah desa pangan aman	21	25 (progress)	25 (progress)	100	BAIK

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume				Kriteria
			Target Tahunan	Target Triwulan	Realisasi Triwulan	Capaian Triwulan (%)	
a	b	c	d	f	g	$h=(g/f*100)$	i
		20-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	25 (progress)	25 (progress)	100	BAIK
6	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	10	43,16	431,6	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	10	44,01	440,1	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
7	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58	10	18,38	183,8	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
8	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4	-	-	-	-
		25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80	-	-	-	-
9	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5	-	-	-	-
10	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-	-	-	-
		28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,25	2,2	97,78	BAIK
11	11-Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5	77	43,81	56,90	KURANG



BALAI BESAR POM DI JAKARTA

 Jalan As'syafiiyah No.133, Cilangkap, Jakarta Timur
 021 843-04-047 / 843-04-049
 021 843-04-046 / 843-04-048
 bpom_jakarta@pom.go.id / bbpomjkt@gmail.com



 [BBPOMJakarta](#)

 [@BPOMJakarta](#)

 [@BPOMJakarta](#)

 [Balai Besar POM Jakarta](#)